



***RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2020***



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaan Nyalah seluruh rangkaian program kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2020 mudah-mudahan dapat terlaksanakan dengan baik.

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan semua pihak untuk turut serta aktif dalam memaksimalkan hubungan antar instansi pemerintah baik di provinsi maupun di pusat dengan baik, meningkatkan SDM yang berkualitas, meningkatkan hubungan antara supra dan infra struktur politik semakin baik, dan adanya Ormas dan organisasi profesi yang semakin berkualitas dalam berpartisipasi menangani pelaksanaan pembangunan di segala bidang serta tidak terlepas daripada adanya rasa kebersamaan dalam kesatuan bangsa dan masyarakat.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 (RENJA-BKBP TA.2020) ini berisikan seluruh rangkaian pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sepanjang Tahun Anggaran 2020 yang dalam penyusunannya tentunya tidak terlepas dari kekurangan. Saran dan perbaikan kami harapkan guna lebih menyempurnakan Rencana Kerja ini sebagai bahan acuan dan pedoman untuk menyusun program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 guna meningkatkan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Mamuju, 28 Februari 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum.....	6
I.3. Maksud dan Tujuan.....	9
I.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2019.....	12
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	12
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	23
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	27
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	28
III.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	28
III.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.....	28
III.3. Program Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat TA. 2019.....	29
BAB IV. PENUTUP.....	33
IV.1. Kesimpulan.....	33
IV.2. Upaya Pemecahan Masalah.....	33



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. H. Abd.Malik Pattana Endeng Telp/Fax (0426)2321806 Mamuju 91512
Email : kesbangpol_kesbangpol@yahoo.com

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ;
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;

13. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51) ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 25 tentang Urusan Pemerintahan Umum dan Pasal 26 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Urusan Pemerintahan Umum.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang

Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintah Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 ;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39) ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50) ;
24. Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No. 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
25. Rancangan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
- KEDUA** : Tim Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 adalah sebagai Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 dan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah. Disamping itu juga merupakan tolak ukur dalam menilai pertanggung jawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 46.a Tahun 2016.
- KETIGA** : Ruang Lingkup Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kesekretariatan; Bidang Bina Ideologi, Wawasan

Kebangsaan dan Karakter Bangsa; Bidang Politik Dalam Negeri; Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan; dan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

- KEEMPAT : Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 sesuai dengan Indikator Kinerja dan Kegiatan yang telah ditetapkan Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
- KELIMA : Sistematis Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 disusun sebagai berikut :
- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- BAB V Penutup
- KEENAM : Isi beserta uraian rincian sebagaimana tersebut Poin KEEMPAT terdapat dalam naskah lampiran Keputusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan.
- KETUJUH : Setiap unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kesekretariatan; Bidang Sekretariat, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi serta Bidang Politik dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran harus berdasarkan dan atau berpedoman kepada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 ;
- KEDELAPAN : Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dapat dilakukan evaluasi dan revisi sepanjang dibutuhkan dan atau diselarasakan dengan situasi dan kondisi serta perubahan yang terjadi baik dilingkungan internal dan eksternal. ;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 28 Februari 2019

KEPALA BADAN

Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
Nomor :
Tanggal : 28 Februari 2019

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Drs.H.Muhammad Rahmat,MM	Kepala Badan Kesbangpol. Prov. Sulbar	Penanggung Jawab
2	Muhammad Salil, SE, M.Si	Sekretaris Badan Kesbang Prov. Sulbar	Ketua
3	Eka Genta Asyuni, SE	Kasubag. Program dan Pelaporan	Sekretaris
4	Maman Suparman	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Irwan, SE	Kasubag. Keuangan	Anggota
6	Muhammad Yusuf Tahir, S.Ag. M.Si	Kabid. Kewaspadaan Nasional	Anggota
7	Muhammad Salil, SE, M.Si	Plt. Kabid. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Anggota
8	Sunusi, S.Pd	Kabid. Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat & Ekonomi	Anggota
9	Barnawi A. S.IP	Plt. Kabid. Politik	Anggota
10	Qamaruddin Kamil, S.STP	Staf	Anggota
10	Habri, S.Pd, M.Hum	Staf	Anggota
11	M. Taufik Syah Sehuddin, SH	Staf	Anggota
12	Petrus Rante Tandiang, SE	Staf	Anggota
13	Asmaul Husna Amin, SE	Staf	Anggota
13	Muh. Faried Fadal, S.STP, M.Si	Staf	Anggota
14	Rakhmat, SE	Staf	Anggota
15	Danar	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 28 Februari 2019

KEPALA BADAN

Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19640408 198603 1 023

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 83 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga mempunyai peran strategis yang menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (RENJA - BKBP) yang ada dalam ruang lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dirumuskan kembali kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan, pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai arti yang strategis

dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah di tahun teknokrat masa transisi Gubernur Sulawesi Barat mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini merupakan tahun teknokrat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Dan secara tidak langsung dapat pula dirumuskan kembali dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (RKPD – BKBP) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.

Faktor-faktor pendukung untuk menyusun Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 yaitu :

1. Mengevaluasi Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 dan tahun berjalan 2019 triwulan pertama (I).
2. Mengevaluasi Renstra tentang beberapa program dan kegiatan yang dapat terakomodir di sepanjang tahun mulai Tahun 2017 sampai Tahun 2022.
3. Dokumen RPJPD periode Tahun 2005 – 2025 sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang turunannya kepada Rancangan RPJMD & RENSTRA dijabarkan kedalam RPJMD Periode I Tahun 2006 – 2011 ; RPJMD Periode II Tahun 2012 – 2016 dan RPJMD Periode III Tahun 2017 - 2022 serta turunannya kepada RENSTRA Periode I Tahun 2006-2011 ; RENSTRA Periode II Tahun 2012-2016 ; RENSTRA Periode III Tahun 2017-2022.
4. Menyandingkan Dokumen Perencanaan RPJMN Buku 3 Periode 2014 – 2019 yang berisikan program-program Nawacita khususnya pada Nawacita yang ke-2

Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya dan Nawacita yang ke-8 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa yang sesuai dengan SKPD terkait khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

5. Mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 khususnya pada Revolusi Mental dengan Program Prioritas yaitu Program Pembinaan Politik dan Penyelegaraan Pemerintahan Umum.
6. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 25 tentang urusan pemerinatahan umum dan pasal 26 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Urusan Pemerintahan Umum.
7. Permendagri No.38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dalam uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 pada Bagian I Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategis pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2020 berpedoman pada RKPD Tahun 2020 masing-masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun

2020 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Tahun 2020.

a. **Belanja Tidak Langsung** bagian 6) Belanja Bantuan Keuangan b). Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

60. Pemerintah Daerah Mensinergikan Penganggaran Program dan Kegiatan Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan kebijakan nasional, antara lain :

- ❖ **Pada huruf m).** Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing.
- ❖ **Pada huruf o).** Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik, pemerintah daerah untuk mendukung bidang-bidang sebagai berikut :
 - 1) Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.
 - 2) Bidang Fasilitasi Politik Dalam Negeri.

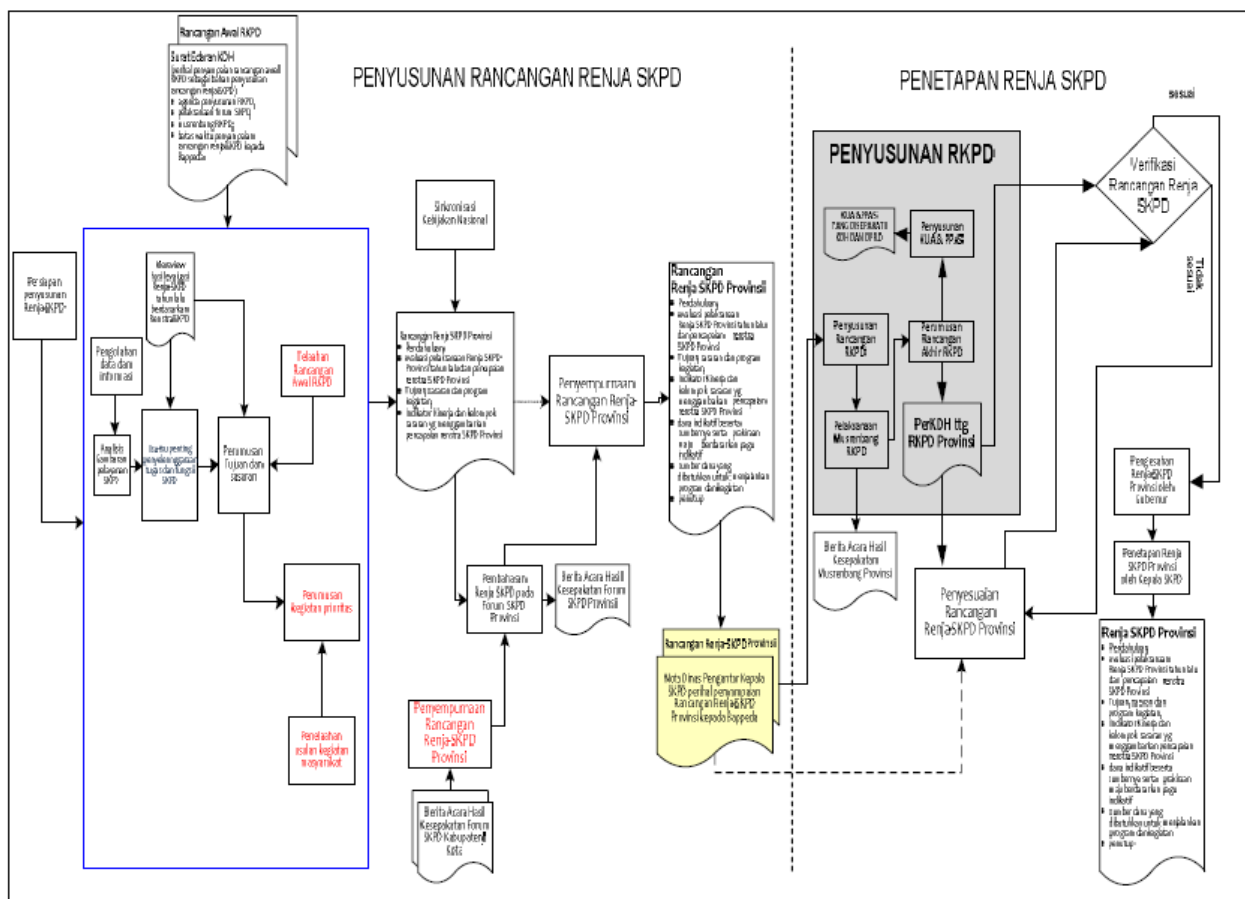
- 3) Bidang Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 4) Bidang Fasilitasi Kewaspadaan Nasional.
- 5) Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat bersama Kepala Badan, Sekretariat dan para kepala-kepala bidang, kasubag-kasubag, dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan kerja selama 1 tahun anggaran yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu, tujuan, sasaran, program serta kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sejalan dengan Visi Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yakni **“Sulawesi Barat Yang Maju dan Malaqbiq**, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah mendukung Misi I Gubernur dan Wakil Gubernur **“Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”** dan Misi II Gubernur dan Wakil Gubernur **“Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Modern dan Terpercaya”**, dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2020 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yakni meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban sebagai salah satu upaya dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Untuk dapat mewujudkan dan melaksanakan Sasaran serta Kebijakan Strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 Penyusunan Renja SKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun ke-2 dari RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 dan RPJMN Periode Tahun 2014 – 2019. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS 2020 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

I.2. LANDASAN HUKUM

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan dilandasi berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
4. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun

- 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;
15. Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 122 Ayat (1) pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan dan Ayat (2) anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintah Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39) ;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50) ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51) ;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2013 (Lembaran Daerah Nomor 1) ;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat BabVII Ketentuan Peralihan Pasal 9 Nomor (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan untuk memberikan pedoman berbagai pencapaian tujuan baik dalam jangka setahun dengan memperhatikan misi dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan.

b. TUJUAN

Tujuan penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja – BKBP) Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

1. Sebagai dasar penyusunan RKPD dan RKA-DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta Rencana Kerja pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat BabVII Ketentuan Peralihan Pasal 9 Nomor (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Dengan demikian, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, merupakan uraian yang menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan dan penetapan Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini yaitu berupa pengertian, landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar penyusunan RKPD dan DPA-RKA serta dengan maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini, agar erat hubungannya antara Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat sebagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dan sistematika penyusunan.

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Triwulan I, merupakan kajian yang memuat (review) terhadap hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 dan perkiraan capaian Tahun 2018, mengacu pada APBD Tahun 2019 pada triwulan I yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik APBD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan / atau realisasi APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersangkutan.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, merupakan suatu telaahan yang menyangkut tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tetap pula mengacu pada tugas pokok serta fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat serta dapat dirumuskan ke dalam program dan kegiatan dan apabila pada program dan kegiatan yang ada tidak sesuai dengan rancangan RKPD harus diberikan penjelasan.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah menguraikan berisikan tabel program dan kegiatan prioritas perangkat daerah yang di breakdown dari prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 dengan cascading system.

Bab IV. Penutup menguraikan kesimpulan, catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaannya, serta rencana tindak lanjut pada tahun depan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 pada Semester I (Januari s/d Juni) dan Semester II (Juli s/d Desember) Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib, dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018, dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan / atau realisasi APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil, keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil, keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil, keluaran yang direncanakan ;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program / kegiatan ;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; dan

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Format Excel Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat s/d Tahun 2018 (Tahun Berjalan)*.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Tercapai tidaknya pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun 2017 dan Perkiraan target Tahun 2018. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. *Penetapan Indikator Kinerja*

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi Indikator Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcomes), Manfaat (Benefit) dan dampak (Impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. *Capaian Analisis Kinerja*

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara terinci hasil-hasil yang telah dicapai selama Tahun 2018 untuk semester I (Januari s/d Juni) Tahun 2019 meliputi:

- a) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.929.780.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.453.367.778,- (48,76 %) dan realisasi fisik 50% serta sisa pagu anggaran Rp.476.412.222,-.

Keluarannya adalah :

1. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan perangkat, materai dan jasa pengiriman surat keseluruh kabupaten dan luar daerah serta kebutuhan honorarium pegawai selama 1 tahun.
2. Tersedianya biaya untuk penggunaan layanan telepon, air, listrik, kawat / faksimili / internet selama 1 tahun.
3. Tersedianya biaya alat tulis kantor selama 1 tahun.
4. Tersedianya biaya cetak, penggandaan dan penjilidan selama 1 tahun.
5. Tersedianya biaya surat kabar / majalah, jasa publikasi, dokumentasi dan iklan pemerintah selama 1 tahun.
6. Tersedianya biaya makanan dan minuman rapat & tamu selama 1 tahun.
7. Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun.
8. Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah selama 1 tahun.

- b).**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan alokasi pagu anggaran Rp.271.850.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.33.420.250,- (12,29%) dan realisasi fisik sebesar 20% serta sisa pagu anggaran Rp.238.429.750,-

Keluarannya adalah:

1. Terbelinya 2 unit sebagai pengadaan kendaraan dinas / operasional selama 1 tahun.
2. Terbelinya 3 unit sebagai pengadaan ke peralatan gedung kantor selama 1 tahun.
3. Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan selama 1 tahun.
4. Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional selama 1 tahun.
5. Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor selama 1 tahun.

- c). **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** , dengan alokasi pagu anggaran Rp.76.490.000,- dan realisasi anggaran Rp.0,- (0%) dan realisasi fisik 0% serta sisa pagu Rp.0,-.

Keluarannya adalah :

Guna meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam hal ini keseragaman dan kenyamanan pegawai, maka diperlukan adanya pengadaan pakaian dinas, beserta kelengkapannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama 1 tahun.

- d). **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan alokasi pagu anggaran Rp.461.380.000,- dengan realisasi anggaran Rp.88.147.000,- (19,11%) dan realisasi fisik 20% serta sisa pagu anggaran Rp.373.233.000,-.

Keluarannya adalah :

Guna meningkatkan kualitas SDM dalam hal ini keahlian dan keterampilan aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan formal aparatur / SDM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama 1 tahun; adanya 4 kali pelaksanaan Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah; adanya 1 kali pelaksanaan Rapat Kerja Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat; adanya 1 kali pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedural (SOP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

- e). **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan alokasi anggaran Rp.110.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp.12.427.500,- (11,25%) dan realisasi fisik 20% serta pagu anggaran Rp.98.072.500,-.

Keluarannya adalah:

Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai berikut :

1. Tersusunnya laporan keuangan semester I & II yang sistematis dan akuntabel Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama 1 tahun anggaran.
2. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang sistematis dan akuntabel Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama 1 tahun anggaran.
3. Tercapainya penyusunan RKA / DPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama 1 tahun anggaran kedepan.
4. Tercapainya penyusunan RKA – Perubahan / DPPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama 1 tahun anggaran.

5. Terciptanya penyusunan Rencana Strategis (Perencanaan 5 Thn) & Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (Renja BKBP Prov. Sulbar) untuk 1 tahun anggaran kedepan.
6. Terevaluasi seluruh program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
7. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah & Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban.

f). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan alokasi anggaran Rp.500.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.67.352.760,- (13,47%) dan realisasi fisik 20% serta sisa pagu anggaran Rp.432.647.240,-.

Keluarannya adalah:

- *Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial.*
Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial merupakan suatu kegiatan rutin yang diselenggarakan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang sudah kondusif.
- *Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing.*
Kegiatan Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing merupakan hubungan antar Individu dalam Masyarakat yang selama ini bersifat nasional juga turut berkembang menjadi internasional. Hal ini sebagai sebuah kemajuan besar yang dapat membawa manfaat bagi kepentingan nasional kita.
- *Antisipasi Dini dan Cegah Dini Terhadap Dampak Teknologi dan Informasi (Media Online).*
Kegiatan Antisipasi Dini dan Cegah Dini Terhadap Dampak Teknologi dan Informasi (Media Online) merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini dalam pencegahan konflik sosial dan implikasinya dalam pembangunan ketahanan wilayah. Optimalisasi kemampuan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial dalam perannya mendukung pemerintah daerah membangun ketahanan wilayah.
- *Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.*
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan Konflik Sosial merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan konflik-konflik sosial yang sering terjadi itu sendiri

dalam masyarakat yang akhir-akhir ini cenderung meningkat, sebab masyarakat yang memilih cara penyelesaian masalah dengan jalan tindakan anarkis dan kekerasan dalam menyampaikan pendapatnya, yang akhirnya bermuara kerusuhan atau konflik sosial.

g). Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan alokasi anggaran Rp.75.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.8.376.000,- (11,17%) dan realisasi fisik 20% serta sisa pagu anggaran Rp.66.624.000,-.

Keluarannya adalah:

- *Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.*

Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi merupakan suatu kegiatan yang mendorong pemerintah untuk mengembangkan tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan dukungan bagi terciptanya pengarusutamaan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk bidang politik. Kegiatan tersebut membangun budaya demokrasi peningkatan kecerdasan politik kaum perempuan dan menjadi sangat penting, karena roh atau hakekat demokrasi ini sendiri adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tanpa membedakan rakyat laki-laki perempuan. Ukuran terwujudnya Demokrasi di suatu Negara, selain adanya pemilu langsung, multi partai, penegakan hukum dan adanya sistem bicameral, juga harus ada terciptanya penghormatan hak-hak asasi manusia tanpa membedakan jenis kelamin, ras maupun gender.

h). Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas, dengan alokasi anggaran Rp.108.545.000,- dengan realisasi anggaran Rp.0,- (0%) dan realisasi fisik 0% serta sisa pagu anggaran Rp.0,-.

Keluarannya adalah:

- *Dialog Pemerintah dengan Ormas.*

Kegiatan Dialog Pemerintah dengan Ormas merupakan suatu kegiatan ormas yang memiliki fungsi yang sangat vital dalam menggerakkan berbagai hal dalam suatu Negara. Untuk menunjang hal ini, Pemerintah merasa perlu melakukan dialog terutama berkaitan dengan isu-isu strategis bidang keormasan agar Pemerintah bisa mendapatkan berbagai masukan dan informasi baik di daerah maupun di pusat.

i). Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan alokasi anggaran Rp.191.455.000,- dengan realisasi anggaran Rp.102.933.500,- (53,76%) dan realisasi fisik 60% serta sisa pagu anggaran Rp.88.521.500,-

Keluarannya adalah :

- *Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama.*

Kegiatan Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama merupakan kegiatan yang melibatkan Pemuda sebagai elemen bangsa yang memiliki posisi dan peran strategis. Pemuda sebagai kader dan calon pemimpin bangsa masa depan adalah penerus estafet kepemimpinan bangsa. Disamping itu, banyak kader muda merupakan kelompok intelektual yang memiliki potensi untuk terlibat dalam pencarian solusi bagi pemecahan masalah bangsa. Merupakan langkah yang strategis jika upaya peningkatan kerukunan umat beragama dan hubungan harmonis antar berbagai elemen bangsa dilakukan dengan melibatkan para tokoh muda.

j) Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran Rp.425.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.171.851.610,- (40,44%) dan realisasi fisik 60% serta sisa pagu anggaran Rp.253.148.390,-

Keluarannya adalah :

- *Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.*

Kegiatan Workshop Verifikasi, dan Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik merupakan bantuan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan :

- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- *Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.*

Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil daerah yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan pemantauan, pelaporan dan evaluasi yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

- *Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Sulawesi Barat.*

Kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur untuk menilai kemajuan demokrasi yang telah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) ini pada dasarnya merupakan community-led assessment yang dibangun atas pondasi kepemilikan nasional.

k).Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, dengan alokasi pagu anggaran Rp.250.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.8.856.000,- (3,54%) dan realisasi fisik 10% serta sisa pagu anggaran Rp.241.144.000,-.

- *Dialog Optimalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.*

Kegiatan Dialog Optimalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda merupakan tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia. Keutuhan nasional terciptanya dengan baik dan bervondasi kuat tidak terlepas dari semangat kesadaran berbangsa dan semangat berkerukunan di antara umat beragama di Indonesia. Dengan memiliki semangat kebangsaan dan semangat kerukunan di antara umat beragama akan menjadi alat utama pemersatu bangsa ini. Karena begitu pentingnya keutuhan nasional itu, maka diharapkan peran serta semua tokoh pemuda, untuk menjadi volunteer perdamaian secara aktif dalam menjaga keamanan dan keutuhan bangsa.

- *Sosialisasi dan Dialog Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Pemuda dan Perempuan.*

Kegiatan Sosialisasi dan Dialog Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Pemuda dan Perempuan merupakan suatu kegiatan yang mensosialisasikan tentang wawasan kebangsaan penting ditanamkan pada setiap warga Negara sebagai proses pembentukan moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah air dalam memelihara kesinambungan kehidupan bangsa dan terpeliharanya NKRI. Terlebih bagi bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa,

agama dan adat istiadat. Pemahaman kebangsaan bagi generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga akan dapat mengurangi potensi konflik dan meredam berkembangnya paham-paham negative pada masyarakat serta dapat melahirkan kader-kader yang mempunyai bekal pemahaman kebangsaan.

- *Dialog dan Seminar Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, Komunisme dan Terorisme Bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.*

Kegiatan Dialog dan Seminar Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, Komunisme dan Terorisme Bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda merupakan nilai-nilai fundamental dan universal dalam Pancasila mampu menjangkau kepentingan lintas bangsa, mengandung cita-cita luhur dan sekaligus menjadi landasan moral dari karakter bangsa yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

I). Program Pembinaan Karakter Bangsa, dengan alokasi pagu anggaran Rp.100.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.99.559.000,- (99,56%) dan realisasi fisik 100% serta sisa pagu anggaran Rp.440.200,-.

- *Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Karakter ke-Indonesia-an di Kalangan Generasi Muda.*

Kegiatan Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Karakter ke-Indonesia-an di Kalangan Generasi Muda merupakan suatu kegiatan yang dimiliki setiap daerah di Indonesia, menjadi karakter nasional dan akan memiliki karakter yang kuat. Maksud dari kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada para peserta tentang pentingnya menggali nilai-nilai kearifan lokal di Sulawesi Barat. Kemudian tujuannya untuk memberikan pemahaman dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut menjadi kesadaran kolektif.

Secara terinci hasil-hasil yang telah dicapai selama Tahun 2018 untuk semester II (Juli s/d Desember) Tahun 2019 meliputi:

a).Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.929.780.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.903.047.249,- (97,12%) dan realisasi fisik 100% serta sisa pagu anggaran Rp.26.732.751,-.

Keluarannya adalah :

- Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan perangkat, materai dan jasa pengiriman surat keseluruh kabupaten dan luar daerah serta kebutuhan honorarium pegawai selama 1 tahun.
- Tersedianya biaya untuk penggunaan layanan telepon, air, listrik, kawat / faxsimili / internet selama 1 tahun.
- Tersedianya biaya alat tulis kantor selama 1 tahun.
- Tersedianya biaya cetak, penggandaan dan penjilidan selama 1 tahun.
- Tersedianya biaya surat kabar / majalah, jasa publikasi, dokumentasi dan iklan pemerintah selama 1 tahun.
- Tersedianya biaya makanan dan minuman rapat & tamu selama 1 tahun.
- Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun.
- Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah selama 1 tahun.

b).Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi pagu anggaran Rp.251.350.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.203.954.650,- (81,41%) dan realisasi fisik sebesar 85% serta sisa pagu anggaran Rp.47.395.350,-.

Keluarannya adalah:

- Terbelinya 2 unit sebagai pengadaan kendaraan dinas / operasional selama 1 tahun.
- Terbelinya 3 unit sebagai pengadaan ke peralatan gedung kantor selama 1 tahun.
- Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan selama 1 tahun.
- Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional selama 1 tahun.
- Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor selama 1 tahun.

c). Program Peningkatan Disiplin Aparatur , dengan alokasi pagu anggaran Rp.76.490.000,- dan realisasi anggaran Rp.75.113.350,- (98,20%) dan realisasi fisik 100% serta sisa pagu

Rp.1.376.650,-.

Keluarannya adalah :

Guna meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam hal ini keseragaman dan kenyamanan pegawai, maka diperlukan adanya pengadaan pakaian dinas, beserta kelengkapannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama 1 tahun.

- d). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan alokasi pagu anggaran Rp.461.380.000,- dengan realisasi anggaran Rp.218.408.600,- (47,34%) dan realisasi fisik 100% serta sisa pagu anggaran Rp.242.971.400,-.

Keluarannya adalah :

Guna meningkatkan kualitas SDM dalam hal ini keahlian dan keterampilan aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan formal aparatur / SDM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama 1 tahun; adanya 4 kali pelaksanaan Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah; adanya 1 kali pelaksanaan Rapat Kerja Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat; adanya 1 kali pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedural (SOP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

- e). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan alokasi anggaran Rp.110.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp.107.367.000,- (97,16%) dan realisasi fisik 100% serta pagu anggaran Rp.3.133.000,-.

Keluarannya adalah:

Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai berikut :

- Tersusunnya laporan keuangan semester I & II yang sistematis dan akuntabel Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama 1 tahun anggaran.
- Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang sistematis dan akuntabel Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama 1 tahun anggaran.

- Tercapainya penyusunan RKA / DPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama 1 tahun anggaran kedepan.
- Tercapainya penyusunan RKA – Perubahan / DPPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama 1 tahun anggaran.
- Terciptanya penyusunan Rencana Strategis (Perencanaan 5 Thn) & Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (Renja BKBP Prov. Sulbar) untuk 1 tahun anggaran kedepan.
- Terevaluasi seluruh program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
- Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah & Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban.

f). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan alokasi anggaran Rp.470.277.000,- dengan realisasi anggaran Rp.462.629.305,- (98,37%) dan realisasi fisik 100% serta sisa pagu anggaran Rp.7.647.695,-.

Keluarannya adalah:

- *Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial.*

Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial merupakan suatu kegiatan rutin yang diselenggarakan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang sudah kondusif.

- *Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing.*

Kegiatan Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing merupakan hubungan antar Individu dalam Masyarakat yang selama ini bersifat nasional juga turut berkembang menjadi internasional. Hal ini sebagai sebuah kemajuan besar yang dapat membawa manfaat bagi kepentingan nasional kita.

- *Antisipasi Dini dan Cegah Dini Terhadap Dampak Teknologi dan Informasi (Media Online).*

Kegiatan Antisipasi Dini dan Cegah Dini Terhadap Dampak Teknologi dan Informasi (Media Online) merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini dalam pencegahan konflik sosial dan implikasinya dalam pembangunan ketahanan

wilayah. Optimalisasi kemampuan deteksi dini dan cegah dini konflik sosial dalam perannya mendukung pemerintah daerah membangun ketahanan wilayah.

- *Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.*

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan Konflik Sosial merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan konflik-konflik sosial yang sering terjadi itu sendiri dalam masyarakat yang akhir-akhir ini cenderung meningkat, sebab masyarakat yang memilih cara penyelesaian masalah dengan jalan tindakan anarkis dan kekerasan dalam menyampaikan pendapatnya, yang akhirnya bermuara kerusuhan atau konflik sosial.

g). Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan alokasi anggaran Rp.75.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.74.886.000,- (99,85%) dan realisasi fisik 100% serta sisa pagu anggaran Rp.114.000,-.

Keluarannya adalah:

- *Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.*

Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi merupakan suatu kegiatan yang mendorong pemerintah untuk mengembangkan tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan dukungan bagi terciptanya pengarusutamaan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk bidang politik. Kegiatan tersebut membangun budaya demokrasi peningkatan kecerdasan politik kaum perempuan dan menjadi sangat penting, karena roh atau hakekat demokrasi ini sendiri adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tanpa membedakan rakyat laki-laki perempuan. Ukuran terwujudnya Demokrasi disuatu Negara, selain adanya pemilu langsung, multi partai, penegakan hukum dan adanya sistem bicameral, juga harus ada terciptanya penghormatan hak-hak asasi manusia tanpa membedakan jenis kelamin, ras maupun gender.

h). Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadan Ormas, dengan alokasi anggaran Rp.90.179.000,- dengan realisasi anggaran Rp.89.962.000,- (99,76%) dan realisasi fisik 100% serta sisa pagu anggaran Rp.217.000,-.

Keluarannya adalah:

- *Dialog Pemerintah dengan Ormas.*

Kegiatan Dialog Pemerintah dengan Ormas merupakan suatu kegiatan ormas yang memiliki fungsi yang sangat vital dalam menggerakkan berbagai hal dalam suatu Negara. Untuk menunjang hal ini, Pemerintah merasa perlu melakukan dialog terutama berkaitan dengan isu-isu strategis bidang keormasan agar Pemerintah bisa mendapatkan berbagai masukan dan informasi baik di daerah maupun di pusat.

i). Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan alokasi anggaran Rp.191.455.000,- dengan realisasi anggaran Rp.186.812.518,- (97,58%) dan realisasi fisik 100% serta sisa pagu anggaran Rp.4.642.482,-.

Keluarannya adalah :

- *Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama.*

Kegiatan Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama merupakan kegiatan yang melibatkan Pemuda sebagai elemen bangsa yang memiliki posisi dan peran strategis. Pemuda sebagai kader dan calon pemimpin bangsa masa depan adalah penerus estafet kepemimpinan bangsa. Disamping itu, banyak kader muda merupakan kelompok intelektual yang memiliki potensi untuk terlibat dalam pencarian solusi bagi pemecahan masalah bangsa. Merupakan langkah yang strategis jika upaya peningkatan kerukunan umat beragama dan hubungan harmonis antar berbagai elemen bangsa dilakukan dengan melibatkan para tokoh muda.

j) Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran Rp394.589.000,- dengan realisasi anggaran Rp.391.686.950,- (99,26%) dan realisasi fisik 100% serta sisa pagu anggaran Rp.2.902.050,-.

Keluarannya adalah :

- *Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.*

Kegiatan Workshop Verifikasi, dan Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik merupakan bantuan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan :

- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- *Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.*

Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil daerah yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan pemantauan, pelaporan dan evaluasi yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

- *Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Sulawesi Barat.*

Kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur untuk menilai kemajuan demokrasi yang telah disesuaikan dengan keadaan dan kondisi Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) ini pada dasarnya merupakan community-led assessment yang dibangun atas pondasi kepemilikan nasional.

k).Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, dengan alokasi pagu anggaran

Rp.244.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.238.891.000,- (97,91%) dan realisasi fisik 100% serta sisa pagu anggaran Rp.5.109.000,-.

- *Dialog Optimalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.*

Kegiatan Dialog Optimalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda merupakan tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia. Keutuhan nasional terciptanya dengan baik dan bervondasi kuat tidak terlepas dari semangat kesadaran berbangsa dan semangat berkerukunan di antara umat beragama di Indonesia. Dengan memiliki semangat kebangsaan dan semangat kerukunan di antara umat beragama akan menjadi alat utama pemersatu bangsa ini. Karena begitu pentingnya keutuhan nasional itu, maka diharapkan peran serta semua tokoh pemuda, untuk menjadi volunteer perdamaian secara aktif dalam menjaga keamanan dan keutuhan bangsa.

- *Sosialisasi dan Dialog Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Pemuda dan Perempuan.*

Kegiatan Sosialisasi dan Dialog Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Pemuda dan Perempuan merupakan suatu kegiatan yang mensosialisasikan tentang wawasan kebangsaan penting ditanamkan pada setiap warga Negara sebagai proses pembentukan moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah air dalam memelihara kesinambungan kehidupan bangsa dan terpeliharanya NKRI. Terlebih bagi bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama dan adat istiadat. Pemahaman kebangsaan bagi generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga akan dapat mengurangi potensi konflik dan meredam berkembangnya paham-paham negative pada masyarakat serta dapat melahirkan kader-kader yang mempunyai bekal pemahaman kebangsaan.

- *Dialog dan Seminar Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, Komunisme dan Terorisme Bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.*

Kegiatan Dialog dan Seminar Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, Komunisme dan Terorisme Bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda merupakan nilai-nilai fundamental dan universal dalam Pancasila mampu menjangkau kepentingan lintas bangsa, mengandung cita-cita luhur dan sekaligus menjadi landasan moral dari karakter bangsa yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

l). Program Pembinaan Karakter Bangsa, dengan alokasi pagu anggaran Rp.100.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.99.559.000,- (99,56%) dan realisasi fisik 100% serta sisa pagu anggaran Rp.440.200,-.

- *Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Karakter ke-Indonesia-an di Kalangan Generasi Muda.*

Kegiatan Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Karakter ke-Indonesia-an di Kalangan Generasi Muda merupakan suatu kegiatan yang dimiliki setiap daerah di Indonesia, menjadi karakter nasional dan akan memiliki karakter yang kuat. Maksud dari kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada para peserta tentang pentingnya menggali nilai-nilai kearifan lokal di Sulawesi Barat. Kemudian tujuannya untuk memberikan pemahaman dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut menjadi kesadaran kolektif.

Adapun realisasi Keuangan dan Fisik kegiatan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 pada semester I (Januari s/d Juni) di gambarkan pada Tabel 2.1

No	Instansi/Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi 01 Januari sampai dengan 29 Juni 2018		
			Keuangan		Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat	7.326.240.744	2.770.639.401	37,82	37,82
	1. Belanja Tidak Langsung	3.826.240.744	1.724.347.203	45,07	45,07
	2. Belanja Langsung	3.500.000.000	1.046.292.198	29,89	29,89
	BELANJA	7.326.240.744	2.770.639.401	37,82	37,82

Adapun realisasi Keuangan dan Fisik kegiatan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 pada semester II (Juli s/d Desember) di gambarkan pada Tabel 2.1

No	Instansi/Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi 31 Juli Januari sampai dengan 30 Desember 2018		
			Keuangan		Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat	7.233.464.553	6.740.865.173	93,19	93,19
	1. Belanja Tidak Langsung	3.838.464.553	3.688.546.751	96,09	96,09
	2. Rasionaliasi	105.000.000			
	2. Belanja Langsung	3.395.000.000	3.052.318.422	89,91	89,91
	BELANJA	7.233.464.553	6.740.865.173	93,19	93,19

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2017 dengan alokasi pagu anggaran **Rp.8.840.935.219,20** terdiri dari pagu belanja langsung sebesar **Rp.5.217.605.729,20,-** dan pagu belanja tidak langsung sebesar **Rp.3.623.329.490,00** terdiri dari 9 Program dan 39 Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau maksimal bisa lebih baik daripada Tahun 2017 walaupun dengan pemberian anggaran yang kurang sedikit daripada anggaran Tahun 2017, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan serta monitoring dan evaluasi hasil pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Belum dipahaminya secara utuh outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan dalam merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
- e. Adanya keterbatasan pemberian anggaran yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, sementara tupoksi yang akan dilaksanakan selama 5 tahun perencanaan strategis begitu besar, dalam hal mewujudkan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat & dinamikasi nilai - nilai sosial budaya serta etika politik yang stabil sesuai dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan pengurusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh pada periode tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dengan arah kebijakan.
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi serta kesejahteraan pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis staf sesuai dengan tugas masing-masing.

- c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang cukup sehingga tercapai efektivitas dan evesiensi.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mewujudkan Good Governence dilaksanakan dengan arah kebijakan: meningkatkan kualitas rencana pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik
 3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk memperoleh pilihan terbaik dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan.
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Provinsi Sulawesi Barat
 - b. Melaksanakan Pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

II. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan Eselon II/a : Kepala Badan
2. Unsur Pimpinan Eselon III/a : Sekretaris Badan
3. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Subbag. Program dan Pelaporan
 - b. Subbag. Umum dan Kepegawaian
 - c. Subbag. Keuangan
4. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a). Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

- 2). Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
- b). Bidang Politik Dalam Negeri yang terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik
 - 2). Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu
- c). Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
 - 2). Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- d). Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 - 1). Sub Bidang Penanganan Konflik
 - 2). Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009, Tanggal 24 Juni 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Akan tetapi perubahan tersebut tidak disertai dengan pelantikan pejabat struktural, sampai pada terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 29 Nopember 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tersebut maka dengan sendirinya perubahan nama SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah tersebut adalah dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dan yang terakhir Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peraturan Gubernur tentang Tupoksi tersebut akan menjadi acuan bagi lembaga maupun aparat untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah

dibidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- 1) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Menyelenggarakan pemberian dukungan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi kesekretariatan, hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa, pengkajian strategis daerah dan perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Analisis kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

✚ **Sasaran** : Peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan hak dan kewajiban politik yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan berdemokrasi, hal ini dapat tertuang dalam Program Pendidikan Politik Masyarakat yang dijabarkan dalam Kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Barat dan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.

✚ **Sasaran** : Peningkatan pengembangan dan pembinaan Ormas untuk terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas yang dijabarkan dalam Kegiatan Tim Fasilitasi, Identifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Ormas dan Kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Permendagri No.57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas.

✚ **Sasaran** : Peningkatan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan kebangsaan dalam kehidupan bernegara yang tertuang dalam Program Pembinaan Ideologi yang dijabarkan dalam Kegiatan Dialog dan Seminar Nilai-Nilai Dalam Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, Komunisme, Terorisme Bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda; Program Pembinaan Karakter Bangsa dijabarkan dalam

Kegiatan Pembinaan Generasi Muda Tentang Cinta Tanah Air Dalam Rangka Revolusi Mental; serta Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dijabarkan dalam Kegiatan Dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat; Kegiatan Sosialisasi dan Dialog Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk Pemuda dan Perempuan

- ✚ **Sasaran** : Peningkatan waspada dini, deteksi dini & cegah dini gejala gangguan Kamtibmas yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang dijabarkan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial; Kegiatan Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing; Kegiatan Pemantauan dan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; Kegiatan Antisipasi Dini dan Cegah Dini Terhadap Dampak Teknologi dan Informasi (Media Online); dan Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial serta Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban yang dijabarkan dalam Kegiatan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- ✚ **Sasaran** : Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Harmonis Antar Suku, Umat Beragama dan Golongan yang tertuang dalam Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan yang dijabarkan ke dalam Kegiatan Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama serta Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas yang dijabarkan dalam Kegiatan Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama.
- ✚ **Sasaran** : Peningkatan Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Serta Mediasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang tertuang dalam Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri yang dijabarkan dalam Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi dan Kegiatan Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya proses pelayanan secara umum kepada publik sesuai kemampuan yang dimiliki.
2. Terciptanya situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.
3. Terwujudnya sinkronisasi antar mitra kerja yang terkait.
4. Terdeteksinya secara dini hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan sosial politik di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Hasil realisasi yang dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jika Badan Kesatuan Bangsa dan politik yang bersangkutan belum tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini.

Format Excel Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

II. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penentuan isu-isu strategis yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan politik.
2. Kurangnya fasilitas infrastruktur politik.
3. Masih kurangnya kemandirian dan kinerja infrastruktur politik.
4. Pembangunan wawasan kebangsaan dan watak budaya demokrasi.
5. Ketahanan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa akan ancaman bencana.

II. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Format Excel Tabel 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

II. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sejauh ini usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat tidak kami dimasukkan ke dalam Program Kegiatan Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (Tidak Ada & Tidak Pernah), tetapi usulan-usulan program dan kegiatan dari beberapa kabupaten untuk Tahun 2020 ini baru kami terima pada saat Musrenbang Provinsi dan telah di asistensi oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Barat pada saat penyusunan RKPD Tahun 2020.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi.
- (3) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - a) Penyelenggaraan pemberian dukungan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi kesekretariatan; politik dalam negeri; ketahanan ekonomi, sosial, budaya & organisasi kemasyarakatan; bina ideologi, wawasan kebangsaan & karakter bangsa; penanganan konflik & kewaspadaan nasional;
 - b) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

1. Meningkatkan wawasan serta pemahaman masyarakat tentang pendidikan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan berdemokrasi.
2. Penguatan fungsi kelembagaan Ormas yang berorientasi pada wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila.
3. Menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Mendukung terciptanya stabilitas politik, sosial budaya, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Meningkatkan fasilitasi kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

1. Peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan hak dan kewajiban politik yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan berdemokrasi.
2. Peningkatan pengembangan dan pembinaan Ormas untuk terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan kebangsaan dalam kehidupan bernegara.
4. Peningkatan waspada dini, deteksi dini & cegah dini gejala gangguan Kamtibmas yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta,
5. Peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.
6. Peningkatan fasilitasi kelembagaan partai politik serta mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

III.3. Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

- a. **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.**

❖ Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada di bawah langsung kendali tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

❖ Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang ada pada tahun 2020 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran Rp.1.215.082.743,- yang terdiri dari 8 kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang-undangan.
 - Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran Rp.242.159.146,-. Yang terdiri dari 10 kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 - Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan Kelengkapannya.
 - Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi.
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan.
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor.
 - Pengadaan Sistem Manajemen Terpadu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
 - Pembangunan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu anggaran Rp.154.304.860,-. Yang terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu anggaran Rp.621.443.246,-. Yang terdiri dari 8 kegiatan sebagai berikut :
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal.

- Rapat Kerja Teknis & Sinkronisasi Program Kegiatan Kesbangpol.se-Provinsi Sulawesi Barat.
 - Rapat Koordinasi Tim Verifikasi, Monev dan Pelaporan Bantuan Dana Hibah.
 - Rapat Koordinasi Strategis Pemerintah Daerah.
 - Rapat Koordinasi Terkait tentang Penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
 - Tim Fasilitasi Pengolahan Data, Analisis Informasi dan Kajian Strategis.
 - Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FORKOPIMDA).
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu Rp.52.423.060,-. Yang terdiri dari 8 kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
 - Penyusunan Renstra-Renja SKPD.
 - Penyusunan RKA / DPA SKPD.
 - Penyusunan RKA-P / DPPA SKPD.
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD.
 - Penyusunan ANJAB dan ABK.
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan pagu Rp.1.450.000.000,-. Yang terdiri dari 22 kegiatan sebagai berikut :
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
 - Training Of Trainer (TOT) Penanganan Konflik Sosial.
 - Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing.
 - Antisipasi Dini dan Cegah Dini Terhadap Dampak Teknologi dan Informasi (Media Online).
 - Penyusunan Ranperda tentang Penanganan Konflik Sosial.
 - Bimtek Penyusunan dan Pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial.
 - Penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial se-Provinsi Sulawesi Barat.

- Pengumpulan Data, Keterangan dan Informasi Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Sosial.
 - Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial.
 - Forum Dialog Komunitas Intelijen Daerah.
 - Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelijen Aparat di Daerah.
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial.
 - Pengembangan dan Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
 - Forum Komunikasi dan Konsolidasi Intelijen Daerah Sulbar.
 - Antisipasi Dini, Cegah Dini, Paham Radikalisme dan Terorisme.
 - Sosialisasi Perda Penanganan Konflik Sosial.
 - Workshop Pengembangan Penanganan Paham Radikalisme dan Terorisme.
 - Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penanganan Paham Radikalisme dan Terorisme.
 - Dukungan Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
 - Pemantauan dan Pengamanan Pelaksana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif.
 - Penguatan dan Pengembangan Tim Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing.
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dengan pagu Rp.100.000.000,-. Yang terdiri dengan 2 kegiatan yaitu :
- Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
 - Workshop Peningkatan Peran Tokoh Pemuda, LSM Dalam Kewaspadaan Dini di Masyarakat.
8. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri dengan pagu Rp.850.000.000,-. Yang terdiri dengan 4 kegiatan yaitu :
- Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 - Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
 - Penyusunan Data Base Kelembagaan Partai Politik.
 - Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.
9. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan pagu Rp.850.000.000,-. Yang terdiri dengan 6 kegiatan yaitu :
- Pengembangan Etika dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal Bagi Masyarakat.
 - Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula.
 - Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.
 - Workshop Penguatan Fungsi Lembaga Partai Politik Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.
 - Sosialisasi Peran dan Fungsi Lembaga-Lembaga Demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat.

- Sosialisasi Permendagri tentang Bantuan Partai Politik.
10. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan pagu Rp.750.000.000. Yang terdiri dari 9 kegiatan yaitu :
- Sosialisasi Perda Provinsi Sulawesi Barat No.3 Tahun 2016 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
 - Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Sulawesi Barat.
 - Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.
 - Penguatan Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama se-Sulawesi Barat.
 - Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Daerah.
 - Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal.
 - Sarasehan dan Dialog Agama dan Ormas.
 - Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama se-Sulbar.
 - Forum Komunikasi dan Konsultasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Forkomkon).
11. Program Peningkatan Fungsi dan Keberadaan Ormas dengan pagu Rp.250.000.000,-. Yang terdiri 4 kegiatan yaitu :
- Tim Identifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Ormas.
 - Dialog Pemerintah Daerah dan Ormas.
 - Sosialisasi dan Desiminasi PP No.58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - Sosialisasi dan Desiminasi Permendagri No.57 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
12. Program Pembinaan Karakter Bangsa dengan pagu Rp.525.000.000,-. Yang terdiri dari 14 kegiatan yaitu :
- Sosialisasi dan Dialog Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk Pemuda dan Perempuan.
 - Monitoring Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan serta Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.
 - Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.
 - Peningkatan Pembinaan Karakter Bangsa Bagi Generasi Muda di Kabupaten Mamuju Utara.
 - Peningkatan Pemahaman dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa dan Kecamatan.
 - Forum Dialog Pembinaan dan Peningkatan Jiwa Nasionalisme Bagi Masyarakat.
 - Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Karakter ke-Indonesia-an di Kalangan Generasi Muda.
 - Pembinaan Kesadaran Generasi Muda tentang Cinta Tanah Air Dalam Rangka Revolusi Mental.

- Pembentukan Kader Bela Negara Bagi Generasi Muda Bagi Generasi dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
 - Dialog dan Seminar Penguatan Nilai Kearifan Lokal Untuk Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
 - Kemah ke-Bhinneka-an Bagi Pelajar se-Sulawesi Barat Untuk Indonesia Satu.
 - Forum Dialog Dalam Rangka Penguatan Kesadaran Masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa / Kelurahan dan Kecamatan.
 - Forum Dialog Lintas Generasi Dalam Rangka Revitalisasi Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan.
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.
13. Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dengan pagu Rp.1.050.000.000. Yang terdiri dari 45 kegiatan yaitu :
- Forum Penguatan Wawasan ke-Sulbar-an Bagi Para Aparatur Sipil Negara se-Sulawesi Barat.
 - Training Of Facilitator (TOF) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Para Guru / Pendidik se-Sulawesi Barat.
 - Penguatan Peran dan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Daerah se-Sulawesi Barat.
 - Dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat.
 - Dialog Optimalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.
 - Musyawarah Kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019-2024.
 - Musyawarah Kerja FPK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2021-2025.
 - Forum Dialog Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda dan Perempuan.
 - Peningkatan Kapasitas ASN tentang Wawasan Kebangsaan Melalui Kegiatan Jelajah Nusantara.
 - Forum Dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Agama, Suku, Ras, Adat, Tokoh Masyarakat dan Pemuda.
 - Forum Koordinasi Antar FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) se-Sulawesi Barat.
 - Sosialisasi dan Dialog Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
 - Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se-Sulawesi Barat.
 - Penyiapan Kader-Kader Pembauran Kebangsaan Melalui Pelatihan Tenaga Terlatih Pembauran Daerah (TPPD).

- Training Of Trainer (TOT) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi Barat.
- Optimalisasi Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Dalam Penguatan Kesadaran Berbangsa di Daerah se-Sulbar.
- Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Kerukunan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh NKRI.
- Workshop Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- Dialog Lintas SARA Dalam Memperkuat Komitmen Kerukunan Bangsa Untuk Sulawesi Barat Malaqbiq.
- Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Rangka Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Terkait Kerukunan Bangsa.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat.
- Dialog dan Seminar Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengantisipasi Penyebaran Pahan Radikalisme, Terorisme dan Komunisme Bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.
- Dialog Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Masyarakat.
- Seminar Penguatan Pemahaman Ideologi Pancasila Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Budaya Lokal Bagi Kalangan Pemuda dan Mahasiswa.
- Forum Dialog Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Masa Depan.
- Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan.
- Seminar / Forum / Dialog / Workshop Penguatan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila Sebagai Satu-satunya Ideologi Berbangsa dan Bernegara.
- Koordinasi Antar Lembaga Terkait Dalam Rangka Pendidikan, Revitalisasi dan Aktualisasi Ideologi Pancasila Bagi Masyarakat.
- Forum Dialog Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Bagi Generasi Muda.
- Fasilitasi Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Ideologi Pancasila Melalui Media Massa Berbasis Internet.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.
- Sosialisasi dan Dialog Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk Pemuda dan Perempuan.
- Monitoring Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan serta Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.
- Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.
- Peningkatan Pembinaan Karakter Bangsa Bagi Generasi Muda di Kabupaten Mamuju Utara.

- Peningkatan Pemahaman dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa dan Kecamatan.
 - Forum Dialog Pembinaan dan Peningkatan Jiwa Nasionalisme Bagi Masyarakat.
 - Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Karakter ke-Indonesia-an di Kalangan Generasi Muda.
 - Pembinaan Kesadaran Generasi Muda tentang Cinta Tanah Air Dalam Rangka Revolusi Mental.
 - Pembentukan Kader Bela Negara Bagi Generasi dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
 - Dialog dan Seminar Penguatan Nilai Kearifan Lokal Untuk Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
 - Kemah ke-Bhinneka-an Bagi Pelajar se-Sulawesi Barat Untuk Indonesia Satu.
 - Forum Dialog Dalam Rangka Penguatan Kesadaran Masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa / Kelurahan dan Kecamatan.
 - Forum Dialog Lintas Generasi Dalam Rangka Revitalisasi Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan.
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKP, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi lainnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1. Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah.

Rumusan Rencanan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan

Prakiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Dalam Format Excel.

III.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil keluaran pada sistem SIMDA

Perencanaan / ePlanning Provinsi Sulawesi Barat. Dalam Format Excel.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan keamanan dan kenyamanan serta ketertiban dan ketentraman itu sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem keamanan dan ketentraman dalam ruang lingkup Provinsi Sulawesi Barat khususnya perencanaan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada TA. 2020

IV.2. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Masalah keamanan dan ketentraman dalam lingkup Provinsi Sulawesi Barat yang berkembang saat ini merupakan tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, di bidang kewaspadaan nasional, di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dan ekonomi serta di bidang politik yang di emban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan tentang keamanan dan ketentraman dalam lingkup Provinsi Sulawesi Barat sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan pengamanan di masa mendatang melalui :
 - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana ;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan ;

- c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional ;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan Ormas dan LSM demi mendukung tingkat keamanan dan ketentraman ;
 - e. Meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja / anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indicator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah actual di bidang keamanan dan ketentraman.
 4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
 5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indicator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

Mamuju, 28 Februari 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H.MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023

LAMPIRAN-LAMPIRAN TABEL :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI BARAT TA. 2020

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.215.082.743	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.215.082.743
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah materai 6000 & 3000 yang terbelikan dan Jumlah gaji PTT yang terbayarkan.	12 Bulan	375.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah materai 6000 & 3000 yang terbelikan dan Jumlah gaji PTT yang terbayarkan.	12 Bulan	375.750.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pembayaran rekening telepon dan fax kantor.	12 Bulan	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pembayaran rekening telepon dan fax kantor.	12 Bulan	30.000.000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah berapa macam jenis alat tulis kantor yang terpakai.	12 Bulan	40.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah berapa macam jenis alat tulis kantor yang terpakai.	12 Bulan	40.000.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan.	12 Bulan	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan.	12 Bulan	30.000.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah bahan bacaan, majalah koran dan ucapan selamat yang terbayarkan.	12 Bulan	40.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah bahan bacaan, majalah koran dan ucapan selamat yang terbayarkan.	12 Bulan	40.000.000
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah makan dan minum rapat, tamu serta pegawai selama setahun.	12 Bulan	50.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah makan dan minum rapat, tamu serta pegawai selama setahun.	12 Bulan	50.000.000
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah SPPD dan laporan perjalanan dinas Luar Daerah selama setahun.	12 Bulan	300.045.750	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah SPPD dan laporan perjalanan dinas Luar Daerah selama setahun.	12 Bulan	300.045.750
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Provinsi, SKPD, Polewali Mandar, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara	Jumlah SPPD dan laporan perjalanan dinas di 5 Kabupaten selama setahun.	12 Bulan	349.286.993	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Provinsi, SKPD, Polewali Mandar, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara	Jumlah SPPD dan laporan perjalanan dinas di 5 Kabupaten selama setahun.	12 Bulan	349.286.993

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR				242.159.146	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR				242.159.146
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan mobil eselon III Jumlah pengadaan mobil double garden Jumlah pengadaan motor	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan mobil eselon III Jumlah pengadaan mobil double garden Jumlah pengadaan motor	0 Unit	0
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan lemari arsip	0 Unit	0	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan lemari arsip	0 Unit	0
3	Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan Kelengkapannya	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan komputer desktop Jumlah pengadaan laptop Jumlah pengadaan printer	0 Unit 0 Unit 0 Unit	0	Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan Kelengkapannya	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan komputer desktop Jumlah pengadaan laptop Jumlah pengadaan printer	0 Unit 0 Unit 0 Unit	0
4	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan CCTV Jumlah pengadaan camera drone Jumlah pengadaan camera vios	0 Paket 0 Unit 0 Unit	0	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan CCTV Jumlah pengadaan camera drone Jumlah pengadaan camera vios	0 Paket 0 Unit 0 Unit	0
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah ruangan kantor yang terpelihara	0 Tahun	0	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah ruangan kantor yang terpelihara	0 Tahun	0
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pemeliharaan BBM, Suku Cadang dan STNK Mobil serta Gaji Sopir Eselon II.	12 Bulan	110.250.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pemeliharaan BBM, Suku Cadang dan STNK Mobil serta Gaji Sopir Eselon II.	12 Bulan	110.250.000
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pemeliharaan 16 Unit motor dan 3 Unit mobil operasional.	12 Bulan	125.750.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pemeliharaan 16 Unit motor dan 3 Unit mobil operasional.	12 Bulan	125.750.000
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pemeliharaan segala peralatan kantor.	12 Bulan	6.159.146	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pemeliharaan segala peralatan kantor.	12 Bulan	6.159.146
9	Pengadaan Peralatan Kantor	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan sistem manajemen terpadu.	0 Paket	0	Pengadaan Peralatan Kantor	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan sistem manajemen terpadu.	0 Paket	0

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Pengadaan Sistem Manajemen Terpadu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor.	0 Dokumen	0	Pengadaan Sistem Manajemen Terpadu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor.	0 Dokumen	0
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				154.304.860	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				154.304.860
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pakaian dinas yang telah tersedia.	1 Paket	154.304.860	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pakaian dinas yang telah tersedia.	1 Paket	154.304.860
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				621.443.246	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				621.443.246
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim III Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim IV Jumlah PNS yang mengikuti diklat lainnya	2 Orang 6 Orang 2 Orang	25.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim III Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim IV Jumlah PNS yang mengikuti diklat lainnya	2 Orang 6 Orang 2 Orang	25.000.000
2	Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan Kesbang Pol. se-Sulawesi Barat	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti Rakertek & Sinkronisasi Program Kegiatan Kesbangpol. se-Provinsi Sulawesi Barat	50 Orang	125.000.000	Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan Kesbang Pol. se-Sulawesi Barat	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti Rakertek & Sinkronisasi Program Kegiatan Kesbangpol. se-Provinsi Sulawesi Barat	50 Orang	125.000.000
3	Rapat Koordinasi Tim Verifikasi, Monev dan Pelaporan Bantuan Dana Hibah	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rakor Tim Verifikasi, Monev dan Pelaporan Bantuan Dana Hibah	0 Org	0	Rapat Koordinasi Tim Verifikasi, Monev dan Pelaporan Bantuan Dana Hibah	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pelaksanaan kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rakor Tim Verifikasi, Monev dan Pelaporan Bantuan Dana Hibah	0 Org	0
4	Rapat Koordinasi Strategis Pemerintah Daerah	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah	40 Org	221.443.246	Rapat Koordinasi Strategis Pemerintah Daerah	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah	40 Org	221.443.246

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Rapat Koordinasi Terkait Tentang Penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Terkait Tentang Penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar	0 Org	0	Rapat Koordinasi Terkait Tentang Penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Terkait Tentang Penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar	0 Org	0
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Monev Pelaksanaan Penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar	40 Orang	50.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Monev Pelaksanaan Penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar	40 Orang	50.000.000
7	Tim Fasilitasi Pengolahan Data, Analisis Informasi & Kajian Strategis	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Tim Fasilitasi Pengolahan Data, Analisis Informasi & Kajian Strategis	0 Orang	0	Tim Fasilitasi Pengolahan Data, Analisis Informasi & Kajian Strategis	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Tim Fasilitasi Pengolahan Data, Analisis Informasi & Kajian Strategis	0 Orang	0
8	Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FORKOPIMDA)	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pelaksanaan kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintah Daerah	4 Kali 100 Orang	200.000.000	Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FORKOPIMDA)	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pelaksanaan kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintah Daerah	4 Kali 100 Orang	200.000.000
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				52.423.060	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				52.423.060
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen laporan yang telah tersusun	2 Dokumen Laporan	4.500.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen laporan yang telah tersusun	2 Dokumen Laporan	4.500.000
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun CaLK yang tersusun	1 Dokumen Laporan	4.500.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun CaLK yang tersusun	1 Dokumen Laporan	4.500.000
3	Penyusunan Renstra - Renja SKPD	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen perencanaan yang telah tersusun	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Renstra - Renja SKPD	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen perencanaan yang telah tersusun	1 Dokumen	5.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Penyusunan RKA / DPA - SKPD	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen rencana pelaksanaan anggaran yang telah tersusun	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan RKA / DPA - SKPD	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen rencana pelaksanaan anggaran yang telah tersusun	2 Dokumen	5.000.000
5	Penyusunan RKA - P / DPPA SKPD	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen rencana pelaksanaan anggaran perubahan yang telah tersusun	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan RKA - P / DPPA - SKPD	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen rencana pelaksanaan anggaran perubahan yang telah tersusun	2 Dokumen	5.000.000
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pelaksanaan monev program kegiatan	4 Laporan	23.923.060	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pelaksanaan monev program kegiatan	4 Laporan	23.923.060
7	Penyusunan Laporan LKiJP, LPPD dan LKPJ	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen pelaporan inti : LKiJP, LPPD dan LKPJ	3 Dokumen Laporan	4.500.000	Penyusunan Laporan LKiJP, LPPD dan LKPJ	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen pelaporan inti : LKiJP, LPPD dan LKPJ	3 Dokumen Laporan	4.500.000
8	Penyusunan Renstra / Renja / LAKIP dan LPPD.	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang telah tersusun.	2 dok.perencanaan & 2 dok. Pelaporan	0	Penyusunan Renstra / Renja / LAKIP dan LPPD.	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang telah tersusun.	2 dok.perencanaan & 2 dok. Pelaporan	0
9	Penyusunan ANJAB dan ABK	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	2 Dokumen	0	Penyusunan ANJAB dan ABK	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	2 Dokumen	0
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN				1.450.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN				1.450.000.000
1	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Provinsi, SKPD	Jumlah pertemuan tim terpadu penanganan konflik sosial	2 Kali	200.000.000	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Provinsi, SKPD	Jumlah pertemuan tim terpadu penanganan konflik sosial	2 Kali	200.000.000
2	Training Of Trainer (TOT) Penanganan Konflik Sosial.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mampu dalam penanganan konflik.	40 Org	100.000.000	Training Of Trainer (TOT) Penanganan Konflik Sosial.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mampu dalam penanganan konflik.	40 Org	100.000.000
3	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Provinsi, SKPD, Mamuju Utara, Polewali Mandar, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah	Jumlah kabupaten yang dipantau orang asing dan lembaga asingnya	6 Kabupaten	150.000.000	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Provinsi, SKPD, Mamuju Utara, Polewali Mandar, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah	Jumlah kabupaten yang dipantau orang asing dan lembaga asingnya	6 Kabupaten	150.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Antisipasi Dini dan Cegah Dini Terhadap Dampak Teknologi dan Informasi (Media Online).	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mampu antisipasi dini dan cegah dini.	40 Org	100.000.000	Antisipasi Dini dan Cegah Dini Terhadap Dampak Teknologi dan Informasi (Media Online).	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mampu antisipasi dini dan cegah dini.	40 Org	100.000.000
5	Penyusunan Ranperda tentang Penanganan Konflik Sosial.	Provinsi, SKPD	Jumlah dokumen penyusunan Ranperda tentang Penanganan Konflik Sosial.	1 Dokumen	0	Penyusunan Ranperda tentang Penanganan Konflik Sosial.	Provinsi, SKPD	Jumlah dokumen penyusunan Ranperda tentang Penanganan Konflik Sosial.	1 Dokumen	0
6	Orientasi Peningkatan Kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah laporan orientasi peningkatan kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Daerah.	1 Laporan	150.000.000	Orientasi Peningkatan Kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah laporan orientasi peningkatan kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Daerah.	1 Laporan	150.000.000
7	Pengembangan dan Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kewaspadaan Dini Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan tim terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini Daerah.	50 Org	200.000.000	Pengembangan dan Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kewaspadaan Dini Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan tim terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini Daerah.	50 Org	200.000.000
8	Pengumpulan Data, Keterangan dan Informasi Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah dokumen laporan pengumpulan data, keterangan dan informasi penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini daerah.	1 Laporan	50.000.000	Pengumpulan Data, Keterangan dan Informasi Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah dokumen laporan pengumpulan data, keterangan dan informasi penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini daerah.	1 Laporan	50.000.000
9	Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi penanganan konflik sosial.	40 Org	150.000.000	Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi penanganan konflik sosial.	40 Org	150.000.000
10	Forum Dialog Komunitas Intelijen Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta kegiatan forum dialog komunitas intelijen daerah.	0 Org	0	Forum Dialog Komunitas Intelijen Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta kegiatan forum dialog komunitas intelijen daerah.	0 Org	0
11	Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelijen Aparat di Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti diklat intelijen.	5 Org	50.000.000	Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelijen Aparat di Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti diklat intelijen.	5 Org	50.000.000
12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah laporan monev pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini daerah.	1 Dok. Lap.	150.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah laporan monev pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini daerah.	1 Dok. Lap.	150.000.000

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	Forum Komunikasi dan Konsolidasi Intelijen Daerah Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta forum komunikasi dan konsolidasi intelijen Daerah Sulbar.	0 Org	0	Forum Komunikasi dan Konsolidasi Intelijen Daerah Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta forum komunikasi dan konsolidasi intelijen Daerah Sulbar.	0 Org	0
14	Antisipasi Dini, Cegah Dini, Paham Radikalisme dan Terorisme.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta antisipasi dini, cegah dini, paham radikalisme dan terorisme.	0 Org	0	Antisipasi Dini, Cegah Dini, Paham Radikalisme dan Terorisme.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta antisipasi dini, cegah dini, paham radikalisme dan terorisme.	0 Org	0
15	Sosialisasi Perda Penanganan Konflik Sosial.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta sosialisasi Perda penanganan konflik sosial.	0 Org	0	Sosialisasi Perda Penanganan Konflik Sosial.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta sosialisasi Perda penanganan konflik sosial.	0 Org	0
16	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penanganan Paham Radikalisme dan Terorisme.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan penanganan paham radikalisme dan terorisme.	0 Org	0	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penanganan Paham Radikalisme dan Terorisme.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan penanganan paham radikalisme dan terorisme.	0 Org	0
17	Dukungan Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.	Provinsi, SKPD	Jumlah dukungan operasional tim terpadu penanganan konflik sosial.	0 Dok.	0	Dukungan Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.	Provinsi, SKPD	Jumlah dukungan operasional tim terpadu penanganan konflik sosial.	0 Dok.	0
18	Pemantauan dan Pengamanan Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pilkada.	Provinsi, SKPD	Jumlah pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pilkada.	6 Kab.	150.000.000	Pemantauan dan Pengamanan Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pilkada.	Provinsi, SKPD	Jumlah pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pilkada.	6 Kab.	150.000.000
19	Pemantuan dan Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif.	Provinsi, SKPD	Jumlah pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dan legislatif.	0 Kab.	0	Pemantuan dan Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif.	Provinsi, SKPD	Jumlah pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dan legislatif.	0 Kab.	0
20	Penguatan dan Pengembangan Tim Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing.	Provinsi, SKPD	Jumlah Tim pemantuan yang mengikuti penguatan dan pengembangan.	0 Tim	0	Penguatan dan Pengembangan Tim Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing.	Provinsi, SKPD	Jumlah Tim pemantuan yang mengikuti penguatan dan pengembangan.	0 Tim	0
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN.				100.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN				100.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat.	40 Org	100.000.000	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat.	40 Org	100.000.000
2	Workshop Peningkatan Peran Tokoh Pemuda, LSM, Dalam Kewaspadaan Dini di Masyarakat.	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta workshop peran tokoh pemuda, LSM, dalam kewaspadaan dini di masyarakat.	0 Org	0	Workshop Peningkatan Peran Tokoh Pemuda, LSM, Dalam Kewaspadaan Dini di Masyarakat.	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta workshop peran tokoh pemuda, LSM, dalam kewaspadaan dini di masyarakat.	0 Org	0
VIII	PROGRAM FASILITASI POLITIK DALAM NEGERI				850.000.000	PROGRAM FASILITASI POLITIK DALAM NEGERI				850.000.000
1	Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.	Provinsi, SKPD	Partai politik yang telah diverifikasi, evaluasi dan pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.	16 Partai	200.000.000	Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.	Provinsi, SKPD	Partai politik yang telah diverifikasi, evaluasi dan pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.	16 Partai	200.000.000
2	Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).	Provinsi, SKPD	Peningkatan demokrasi IDI terhadap 3 aspek yaitu : aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik & aspek lembaga demokrasi.	3 aspek, 11 variabel & 28 indikator	250.000.000	Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).	Provinsi, SKPD	Peningkatan demokrasi IDI terhadap 3 aspek yaitu : aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik & aspek lembaga demokrasi.	3 aspek, 11 variabel & 28 indikator	250.000.000
3	Penyusunan Data Base Kelembagaan Partai Politik.	Provinsi, SKPD	Tersusunnya database Partai Politik sebagai peserta Pemilu.	16 Partai	200.000.000	Penyusunan Data Base Kelembagaan Partai Politik.	Provinsi, SKPD	Tersusunnya database Partai Politik sebagai peserta Pemilu.	16 Partai	200.000.000
4	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.	Provinsi, SKPD	Menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif.	5 Dok. Lap.	200.000.000	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.	Provinsi, SKPD	Menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif.	5 Dok. Lap.	200.000.000
IX	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT				850.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT				850.000.000
1	Pengembangan Etika dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal Bagi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Mampu memahami budaya dan kebiasaan masyarakat di tempat dimana dia berada.	1 Dok. Lap.	250.000.000	Pengembangan Etika dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal Bagi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Mampu memahami budaya dan kebiasaan masyarakat di tempat dimana dia berada.	1 Dok. Lap.	250.000.000
2	Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula.	Provinsi, SKPD	Meningkatnya pemahaman tentang politik bagi masyarakat bagi pemilih pemula.	1 Dok. Lap.	200.000.000	Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula.	Provinsi, SKPD	Meningkatnya pemahaman tentang politik bagi masyarakat bagi pemilih pemula.	1 Dok. Lap.	200.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.	Provinsi, SKPD	Meningkatnya pemahaman tentang berpolitik bagi kaum perempuan dalam kehidupan berdemokrasi.	1 Dok. Lap.	150.000.000	Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.	Provinsi, SKPD	Meningkatnya pemahaman tentang berpolitik bagi kaum perempuan dalam kehidupan berdemokrasi.	1 Dok. Lap.	150.000.000
4	Workshop Penguatan Fungsi Lembaga Partai Politik Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.	Provinsi, SKPD	Pelaksanaanya fungsi lembaga partai politik dalam kehidupan berdemokrasi.	1 Dok. Lap.	250.000.000	Workshop Penguatan Fungsi Lembaga Partai Politik Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.	Provinsi, SKPD	Pelaksanaanya fungsi lembaga partai politik dalam kehidupan berdemokrasi.	1 Dok. Lap.	250.000.000
5	Sosialisasi Peran dan Fungsi Lembaga - Lembaga Demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Meningkatnya sosialisasi pemahaman tentang peran dan fungsi lembaga - lembaga demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat..	0 Dok. Lap.	0	Sosialisasi Peran dan Fungsi Lembaga - Lembaga Demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Meningkatnya sosialisasi pemahaman tentang peran dan fungsi lembaga - lembaga demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat..	0 Dok. Lap.	0
6	Sosialisasi Permendagri Tentang Bantuan Partai Politik.	Provinsi, SKPD	Meningkatnya pemahaman sosialisasi Permendagri tentang Bantuan Partai Politik.	0 Dok. Lap.	0	Sosialisasi Permendagri Tentang Bantuan Partai Politik.	Provinsi, SKPD	Meningkatnya pemahaman sosialisasi Permendagri tentang Bantuan Partai Politik.	0 Dok. Lap.	0
X	PROGRAM KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA & KEMASYARAKATAN.				750.000.000	PROGRAM KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA & KEMASYARAKATAN				750.000.000
1	Sosialisasi Perda Provinsi Sulawesi Barat No. 3 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.	Provinsi, SKPD	Meningkatnya pemahaman sosialisasi Perda Provinsi Sulawesi Barat No.3 tentang pencegahan, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya.	0 Kali	0	Sosialisasi Perda Provinsi Sulawesi Barat No. 3 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.	Provinsi, SKPD	Meningkatnya pemahaman sosialisasi Perda Provinsi Sulawesi Barat No.3 tentang pencegahan, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya.	0 Kali	0
2	Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Rakorda FKUB se-Sulawesi Barat.	40 Org	150.000.000	Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Rakorda FKUB se-Sulawesi Barat.	40 Org	150.000.000
3	Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peran FKUB dalam memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama.	0 Org	0	Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peran FKUB dalam memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama.	0 Org	0
4	Penguatan Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan kelembagaan FKUB se-Sulawesi Barat.	40 Org	150.000.000	Penguatan Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan kelembagaan FKUB se-Sulawesi Barat.	40 Org	150.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pelestarian kesenian daerah.	0 Kali	0	Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pelestarian kesenian daerah.	0 Kali	0
6	Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal.	1 Kali	150.000.000	Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal.	1 Kali	150.000.000
7	Sarasehan dan Dialog Agama dan Ormas.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan dan dialog agama dan ormas.	1 Kali	150.000.000	Sarasehan dan Dialog Agama dan Ormas.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan dan dialog agama dan ormas.	1 Kali	150.000.000
8	Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama se-Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti temu tokoh agama, generasi muda antar umat beragama se-Sulbar.	0 Org	0	Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama se - Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti temu tokoh agama, generasi muda antar umat beragama se-Sulbar.	0 Org	0
9	Forum Komunikasi dan Konsultasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Forkomkon P4GN).	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan Forkomkon P4GN.	1 Kali	150.000.000	Forum Komunikasi dan Konsultasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Forkomkon P4GN).	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan Forkomkon P4GN.	1 Kali	150.000.000
XI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS FUNGSI DAN KEBERADAAN ORMAS.				250.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS FUNGSI DAN KEBERADAAN ORMAS				250.000.000
1	Tim Identifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Ormas.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti tim identifikasi, monitoring, evaluasi dan penanganan Ormas.	0 Org	-	Tim Identifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Ormas.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti tim identifikasi, monitoring, evaluasi dan penanganan Ormas.	0 Org	-
2	Dialog Pemerintah Daerah dan Ormas.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog pemerintah daerah dan Ormas.	30 Org	150.000.000	Dialog Pemerintah Daerah dan Ormas.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog pemerintah daerah dan Ormas.	30 Org	150.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Sosialisasi dan Desiminasi PP No. 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan desiminasi PP No.58 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.	0 Kali & 0 Org	0	Sosialisasi dan Desiminasi PP No. 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan desiminasi PP No.58 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.	0 Kali & 0 Org	0
4	Tim Terpadu Pengawasan dan Evaluasi Ormas.	Provinsi, SKPD	Jumlah tim terpadu yang terbentuk untuk pengawasan dan evaluasi Ormas	1 Tm	100.000.000	Tim Terpadu Pengawasan dan Evaluasi Ormas.	Provinsi, SKPD	Jumlah tim terpadu yang terbentuk untuk pengawasan dan evaluasi Ormas	1 Tm	100.000.000
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN				1.900.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN				1.900.000.000
1	Forum Penguatan Wawasan Ke - Sulbar-an Bagi Para Aparatur Sipil Negara se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan forum penguatan wawasan ke-Sulbar-an bagi para ASN se-Sulbar.	40 Org	100.000.000	Forum Penguatan Wawasan Ke - Sulbar-an Bagi Para Aparatur Sipil Negara se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan forum penguatan wawasan ke-Sulbar-an bagi para ASN se-Sulbar.	40 Org	100.000.000
2	Training Of Facilitator (TOF) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Para Guru/ Pendidik se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah TOF PWK bagi para guru / pendidik se-Sulbar.	50 Org	150.000.000	Training Of Facilitator (TOF) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Para Guru/ Pendidik se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah TOF PWK bagi para guru / pendidik se-Sulbar.	50 Org	150.000.000
3	Optimalisasi Peran Pusat Pendidik Wawasan Kebangsaan (PPWK) Dalam Penguatan Kesadaran Berbangsa di Daerah se-Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti optimalisasi peran PPWK dalam penguatan kesadaran berbangsa di Daerah se-Sulbar.	40 Org	100.000.000	Optimalisasi Peran Pusat Pendidik Wawasan Kebangsaan (PPWK) Dalam Penguatan Kesadaran Berbangsa di Daerah se-Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti optimalisasi peran PPWK dalam penguatan kesadaran berbangsa di Daerah se-Sulbar.	40 Org	100.000.000
4	Penguatan Peran dan kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Daerah se- Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan peran dan kapasitas FPK di Daerah se-Sulbar.	40 Org	100.000.000	Penguatan Peran dan kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Daerah se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan peran dan kapasitas FPK di Daerah se-Sulbar.	40 Org	100.000.000
5	Dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembauran kebangsaan bagi pemuka adat, suku dan masyarakat.	40 Org	100.000.000	Dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembauran kebangsaan bagi pemuka adat, suku dan masyarakat.	40 Org	100.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	- Dialog Optimalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan dialog optimalisasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.	40 Org	100.000.000	- Dialog Optimalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan dialog optimalisasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.	40 Org	100.000.000
7	- Musyawarah kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019 - 2024.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2019-2024.	0 Kali	0	- Musyawarah kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019 - 2024.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2019-2024.	0 Kali	0
8	- Musyawarah Kerja FPK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2021 - 2025.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2019-2024.	1 Kali	100.000.000	- Musyawarah Kerja FPK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2021 - 2025.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2019-2024.	1 Kali	100.000.000
9	- Forum Dialog Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda dan Perempuan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta forum dialog peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi pemuda dan perempuan.	1 Kali & 40 Org	150.000.000	- Forum Dialog Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda dan Perempuan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta forum dialog peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi pemuda dan perempuan.	1 Kali & 40 Org	150.000.000
10	- Peningkatan Kapasitas ASN Tentang Wawasan Kebangsaan Melalui Kegiatan Jelajah Nusantara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN tentang wawasan kebangsaan melalui kegiatan Jelajah Nusantara.	25 Org	75.000.000	- Peningkatan Kapasitas ASN Tentang Wawasan Kebangsaan Melalui Kegiatan Jelajah Nusantara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN tentang wawasan kebangsaan melalui kegiatan Jelajah Nusantara.	25 Org	75.000.000
11	- Forum dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Agama, Suku, Ras, Adat, Tokoh Masyarakat dan Pemuda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta forum dialog optimalisasi pembauran kebangsaan bagi pemuka agama, suku, ras, adat, tokoh masyarakat dan pemuda.	30 Org	75.000.000	- Forum dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Agama, Suku, Ras, Adat, Tokoh Masyarakat dan Pemuda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta forum dialog optimalisasi pembauran kebangsaan bagi pemuka agama, suku, ras, adat, tokoh masyarakat dan pemuda.	30 Org	75.000.000
12	- Forum Koordinasi Antar FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum koordinasi antar FPK se-Sulawesi Barat.	0 Org	0	- Forum Koordinasi Antar FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum koordinasi antar FPK se-Sulawesi Barat.	0 Org	0

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	Sosialisasi dan Dialog Pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan Di Lingkungan Perguruan Tinggi.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan dialog pengembangan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi.	100%	150.000.000	Sosialisasi dan Dialog Pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan Di Lingkungan Perguruan Tinggi.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan dialog pengembangan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi.	100%	150.000.000
14	Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se - Sulawesi Barat.	40 Org	100.000.000	Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se - Sulawesi Barat.	40 Org	100.000.000
15	Penyiapan Kader - Kader Pembauran Kebangsaan Melalui Pelatihan Tenaga Terlatih Pembauran Daerah (TPPD).	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Penyiapan Kader - Kader Pembauran Kebangsaan Melalui Pelatihan Tenaga Terlatih Pembauran Daerah (TPPD).	40 Org	100.000.000	Penyiapan Kader - Kader Pembauran Kebangsaan Melalui Pelatihan Tenaga Terlatih Pembauran Daerah (TPPD).	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Penyiapan Kader - Kader Pembauran Kebangsaan Melalui Pelatihan Tenaga Terlatih Pembauran Daerah (TPPD).	40 Org	100.000.000
16	Training Of trainer (TOT) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan TOT Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi Barat.	40 Org	100.000.000	Training Of trainer (TOT) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan TOT Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi Barat.	40 Org	100.000.000
17	Optimalisasi Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Dalam Penguatan Kesadaran Berbangsa di Daerah se-Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti optimalisasi peran PPWK dalam penguatan kesadaran berbangsa di Daerah se-Sulbar.	100 Org	150.000.000	Optimalisasi Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Dalam Penguatan Kesadaran Berbangsa di Daerah se-Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti optimalisasi peran PPWK dalam penguatan kesadaran berbangsa di Daerah se-Sulbar.	100 Org	150.000.000
18	Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Kerukunan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh NKRI.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kerukunan bangsa dalam rangka memperkuat NKRI.	40 Org	150.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Kerukunan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh NKRI.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kerukunan bangsa dalam rangka memperkuat NKRI.	40 Org	150.000.000
19	Workshop Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.	0 Org	0	Workshop Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.	0 Org	0

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
20	Dialog Lintas SARA Dalam Memperkuat Komitmen Kerukunan Bangsa Untuk Sulawesi Barat Malaqbi.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog Lintas SARA dalam memperkuat komitmen kerukunan bangsa untuk Sulbar Malaqbiq.	0 Org	0	Dialog Lintas SARA Dalam Memperkuat Komitmen Kerukunan Bangsa Untuk Sulawesi Barat Malaqbi.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog Lintas SARA dalam memperkuat komitmen kerukunan bangsa untuk Sulbar Malaqbiq.	0 Org	0
21	Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Rangka Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Terkait Kerukunan Bangsa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta peningkatan kapasitas ASN dalam rangka sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan terkait kerukunan bangsa.	0 Org	0	Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Rangka Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Terkait Kerukunan Bangsa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta peningkatan kapasitas ASN dalam rangka sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan terkait kerukunan bangsa.	0 Org	0
22	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	1 Lap.	100.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	1 Lap.	100.000.000
XIII	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA				750.000.000	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA				750.000.000
1	Dialog dan Seminar Nilai - Nilai Pancasila Dalam Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme Bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan seminar nilai-nilai Pancasila dalam mengantisipasi penyebaran paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.	40 Org	200.000.000	Dialog dan Seminar Nilai - Nilai Pancasila Dalam Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme Bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan seminar nilai-nilai Pancasila dalam mengantisipasi penyebaran paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.	40 Org	200.000.000
2	Dialog Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat.	40 Org	100.000.000	Dialog Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat.	40 Org	100.000.000
3	Seminar Penguatan Pemahaman Ideologi Pancasila Sebagai Perwujudan Nilai - Nilai Budaya Lokal Bagi Kalangan Pemuda dan Mahasiswa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti seminar penguatan pemahaman Ideologi Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai budaya lokal bagi kalangan pemuda dan mahasiswa.	40 Org	150.000.000	Seminar Penguatan Pemahaman Ideologi Pancasila Sebagai Perwujudan Nilai - Nilai Budaya Lokal Bagi Kalangan Pemuda dan Mahasiswa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti seminar penguatan pemahaman Ideologi Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai budaya lokal bagi kalangan pemuda dan mahasiswa.	40 Org	150.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Forum Dialog Penguatan Nilai - Nilai Pancasila Senagai Ideologi Terbuka Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Masa Depan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog penguatan nilai-nilai Pancasila senagai Ideologi terbuka untuk mewujudkan visi Indonesia Masa Depan.	0 Org	0	Forum Dialog Penguatan Nilai - Nilai Pancasila Senagai Ideologi Terbuka Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Masa Depan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog penguatan nilai-nilai Pancasila senagai Ideologi terbuka untuk mewujudkan visi Indonesia Masa Depan.	0 Org	0
5	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi komunitas masyarakat berbasis keagamaan.	0 Org	0	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi komunitas masyarakat berbasis keagamaan.	0 Org	0
6	Seminar / Forum Dialog / Workshop Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pancasila Sebagai Satu - satunya Ideologi Berbangsa dan Bernegara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta seminar / forum dialog / workshop penguatan kesadaran masyarakat tentang Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi berbangsa dan bernegara.	40 Org	150.000.000	Seminar / Forum Dialog / Workshop Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pancasila Sebagai Satu - satunya Ideologi Berbangsa dan Bernegara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta seminar / forum dialog / workshop penguatan kesadaran masyarakat tentang Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi berbangsa dan bernegara.	40 Org	150.000.000
7	Koordinasi Antar Lembaga Terkait Dalam Rangka Pendidikan, Revitalisasi, dan Aktualisasi Ideologi Pancasila Bagi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka pendidikan, revitalisasi dan aktualisasi Ideologi Pancasila bagi Masyarakat.	40 Org	150.000.000	Koordinasi Antar Lembaga Terkait Dalam Rangka Pendidikan, Revitalisasi, dan Aktualisasi Ideologi Pancasila Bagi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka pendidikan, revitalisasi dan aktualisasi Ideologi Pancasila bagi Masyarakat.	40 Org	150.000.000
8	Forum dialog Implementasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Bagi Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bagi Generasi Muda.	0 Org	0	Forum dialog Implementasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Bagi Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bagi Generasi Muda.	0 Org	0
9	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Ideologi Pancasila Melalui Media Massa Berbasis Internet.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila melalui media massa berbasis Internet.	0 Org	0	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Ideologi Pancasila Melalui Media Massa Berbasis Internet.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila melalui media massa berbasis Internet.	0 Org	0
10	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0 Kali	0	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0 Kali	0

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
XIV	PROGRAM PEMBINAAN KARAKTER BANGSA				525.000.000	PROGRAM PEMBINAAN KARAKTER BANGSA				525.000.000
1	Sosialisasi dan dialog pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan Untuk Pemuda dan Perempuan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta sosialisasi dan dialog pengembangan nilai-nilai kebangsaan untuk Pemuda dan Perempuan.	0 Org	0	Sosialisasi dan dialog pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan Untuk Pemuda dan Perempuan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta sosialisasi dan dialog pengembangan nilai-nilai kebangsaan untuk Pemuda dan Perempuan.	0 Org	0
2	Monitoring Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan Serta Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah monev pelaksanaan PWK, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan serta karakter bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0 Org	0	Monitoring Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan Serta Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah monev pelaksanaan PWK, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan serta karakter bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0 Org	0
3	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat.	40 Org	100.000.000	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat.	40 Org	100.000.000
4	Peningkatan Pembinaan Karakter Bangsa Bagi Generasi Muda di Kabupaten Mamuju Utara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang peningkatan pembinaan karakter bangsa bagi generasi muda di Kabupaten Mamuju Utara.	40 Org	150.000.000	Peningkatan Pembinaan Karakter Bangsa Bagi Generasi Muda di Kabupaten Mamuju Utara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang peningkatan pembinaan karakter bangsa bagi generasi muda di Kabupaten Mamuju Utara.	40 Org	150.000.000
5	Peningkatan Pemahaman dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa dan Kecamatan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pemahaman dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat desa dan kecamatan.	0 Org	0	Peningkatan Pemahaman dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa dan Kecamatan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pemahaman dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat desa dan kecamatan.	0 Org	0
6	Forum Dialog Pembinaan dan Peningkatan Jiwa Nasionalisme Bagi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog pembinaan dan peningkatan jiwa nasionalisme bagi masyarakat.	0 Org	0	Forum Dialog Pembinaan dan Peningkatan Jiwa Nasionalisme Bagi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog pembinaan dan peningkatan jiwa nasionalisme bagi masyarakat.	0 Org	0
7	Penguatan Nilai - Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Karakter Ke - Indonesia-an di Kalangan Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun karakter Ke-Indonesia-an di kalangan generasi muda.	0 Org	0	Penguatan Nilai - Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Karakter Ke - Indonesia-an di Kalangan Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun karakter Ke-Indonesia-an di kalangan generasi muda.	0 Org	0

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Pembinaan Kesadaran Generasi Muda Tentang Cinta Tanah Air Dalam Rangka Revolusi Mental.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kesadaran generasi muda tentang cinta tanah air dalam rangka Revolusi Mental.	0 Org	0	Pembinaan Kesadaran Generasi Muda Tentang Cinta Tanah Air Dalam Rangka Revolusi Mental.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kesadaran generasi muda tentang cinta tanah air dalam rangka Revolusi Mental.	0 Org	0
9	Pembentukan Kader Bela Negara Bagi Generasi dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembentukan kader bela negara bagi generasi dan masyarakat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	0 Org	0	Pembentukan Kader Bela Negara Bagi Generasi dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembentukan kader bela negara bagi generasi dan masyarakat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	0 Org	0
10	Dialog dan seminar Penguatan Nilai Kearifan Lokal Untuk Membentuk karakter Bangsa Dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan seminar penguatan nilai kearifan lokal untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	0 Org	0	Dialog dan seminar Penguatan Nilai Kearifan Lokal Untuk Membentuk karakter Bangsa Dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan seminar penguatan nilai kearifan lokal untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	0 Org	0
11	Kemah Ke - Bhineka-an Bagi Pelajar se - Sulawesi Barat untuk Indonesia Satu.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti kemah ke-Bhinneka-an bagi pelajar se-Sulawesi Barat untuk Indonesia Satu.	0 Org	0	Kemah Ke - Bhineka-an Bagi Pelajar se - Sulawesi Barat untuk Indonesia Satu.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti kemah ke-Bhinneka-an bagi pelajar se-Sulawesi Barat untuk Indonesia Satu.	0 Org	0
12	Forum Dialog Dalam Rangka penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Bhineka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog dalam rangka penguatan kesadaran masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.	50 Org	200.000.000	Forum Dialog Dalam Rangka penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Bhineka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog dalam rangka penguatan kesadaran masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.	50 Org	200.000.000
13	Forum Dialog lintas Generasi Dalam Rangka Revitalisasi Nilai -Nilai Sejarah Kebangsaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog lintas generasi dalam rangka revitalisasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.	0 Org	0	Forum Dialog lintas Generasi Dalam Rangka Revitalisasi Nilai - Nilai Sejarah Kebangsaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog lintas generasi dalam rangka revitalisasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.	0 Org	0
14	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan movev pembinaan karakter bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	1 Lap.	75.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan movev pembinaan karakter bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	1 Lap.	75.000.000
XV	PROGRAM BINA IDEOLOGI, KARAKTER & WAWASAN KEBANGSAAN				1.050.000.000	PROGRAM BINA IDEOLOGI, KARAKTER & WAWASAN KEBANGSAAN				1.050.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Forum Penguatan Wawasan Ke - Sulbar-an Bagi Para Aparatur Sipil Negara se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan forum penguatan wawasan ke-Sulbar-an bagi para ASN se-Sulbar.	0 Org	0	Forum Penguatan Wawasan Ke - Sulbar-an Bagi Para Aparatur Sipil Negara se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan forum penguatan wawasan ke-Sulbar-an bagi para ASN se-Sulbar.	0 Org	0
2	Training Of Facilitator (TOF) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Para Guru/ Pendidik se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah TOF PWK bagi para guru / pendidik se-Sulbar.	0 Org	0	Training Of Facilitator (TOF) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Para Guru/ Pendidik se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah TOF PWK bagi para guru / pendidik se-Sulbar.	0 Org	0
3	Optimalisasi Peran Pusat Pendidik Wawasan Kebangsaan (PPWK) Dalam Penguatan Kesadaran Berbangsa di Daerah se-Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti optimalisasi peran PPWK dalam penguatan kesadaran berbangsa di Daerah se-Sulbar.	0 Org	0	Optimalisasi Peran Pusat Pendidik Wawasan Kebangsaan (PPWK) Dalam Penguatan Kesadaran Berbangsa di Daerah se-Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti optimalisasi peran PPWK dalam penguatan kesadaran berbangsa di Daerah se-Sulbar.	0 Org	0
4	Penguatan Peran dan kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Daerah se- Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan peran dan kapasitas FPK di Daerah se-Sulbar.	0 Org	0	Penguatan Peran dan kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Daerah se- Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan peran dan kapasitas FPK di Daerah se-Sulbar.	0 Org	0
5	Dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembauran kebangsaan bagi pemuka adat, suku dan masyarakat.	0 Org	0	Dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembauran kebangsaan bagi pemuka adat, suku dan masyarakat.	0 Org	0
6	Dialog Optimalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan dialog optimalisasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.	0 Org	0	Dialog Optimalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan dialog optimalisasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.	0 Org	0
7	Musyawahar kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019 - 2024.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2019-2024.	0 Kali	0	Musyawahar kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019 - 2024.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2019-2024.	0 Kali	0

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Musyawarah Kerja FPK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2021 - 2025.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2019-2024.	0 Kali	0	Musyawarah Kerja FPK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2021 - 2025.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2019-2024.	0 Kali	0
9	Forum Dialog Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda dan Perempuan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta forum dialog peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi pemuda dan perempuan.	0 Org	0	Forum Dialog Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda dan Perempuan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta forum dialog peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi pemuda dan perempuan.	0 Org	0
10	Peningkatan Kapasitas ASN Tentang Wawasan Kebangsaan Melalui Kegiatan Jelajah Nusantara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN tentang wawasan kebangsaan melalui kegiatan Jelajah Nusantara.	25 Org	75.000.000	Peningkatan Kapasitas ASN Tentang Wawasan Kebangsaan Melalui Kegiatan Jelajah Nusantara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN tentang wawasan kebangsaan melalui kegiatan Jelajah Nusantara.	25 Org	75.000.000
11	Forum dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Agama, Suku, Ras, Adat, Tokoh Masyarakat dan Pemuda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta forum dialog optimalisasi pembauran kebangsaan bagi pemuka agama, suku, ras, adat, tokoh masyarakat dan pemuda.	0 Org	0	Forum dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Agama, Suku, Ras, Adat, Tokoh Masyarakat dan Pemuda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta forum dialog optimalisasi pembauran kebangsaan bagi pemuka agama, suku, ras, adat, tokoh masyarakat dan pemuda.	0 Org	0
12	Forum Koordinasi Antar FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum koordinasi antar FPK se-Sulawesi Barat.	0 Org	0	Forum Koordinasi Antar FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum koordinasi antar FPK se-Sulawesi Barat.	0 Org	0
13	Sosialisasi dan Dialog Pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan Di Lingkungan Perguruan Tinggi.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan dialog pengembangan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi.	40 Org	150.000.000	Sosialisasi dan Dialog Pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan Di Lingkungan Perguruan Tinggi.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan dialog pengembangan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi.	40 Org	150.000.000
14	Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se - Sulawesi Barat.	0 Org	0	Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se - Sulawesi Barat.	0 Org	0
15	Penyiapan Kader - Kader Pembauran Kebangsaan Melalui Pelatihan Tenaga Terlatih Pembauran Daerah (TPPD).	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Penyiapan Kader - Kader Pembauran Kebangsaan Melalui Pelatihan Tenaga Terlatih Pembauran Daerah (TPPD).	0 Org	0	Penyiapan Kader - Kader Pembauran Kebangsaan Melalui Pelatihan Tenaga Terlatih Pembauran Daerah (TPPD).	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Penyiapan Kader - Kader Pembauran Kebangsaan Melalui Pelatihan Tenaga Terlatih Pembauran Daerah (TPPD).	0 Org	0

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	- Training Of trainer (TOT) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan TOT Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi Barat.	0 Org	0	- Training Of trainer (TOT) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan TOT Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi Barat.	0 Org	0
17	- Optimalisasi Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Dalam Penguatan Kesadaran Berbangsa di Daerah se-Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti optimalisasi peran PPWK dalam penguatan kesadaran berbangsa di Daerah se-Sulbar.	40 Org	150.000.000	- Optimalisasi Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Dalam Penguatan Kesadaran Berbangsa di Daerah se-Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti optimalisasi peran PPWK dalam penguatan kesadaran berbangsa di Daerah se-Sulbar.	40 Org	150.000.000
18	- Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Kerukunan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh NKRI.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kerukunan bangsa dalam rangka memperkokoh NKRI.	40 Org	150.000.000	- Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Kerukunan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh NKRI.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kerukunan bangsa dalam rangka memperkokoh NKRI.	40 Org	150.000.000
19	- Workshop Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.	0 Org	0	- Workshop Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.	0 Org	0
20	- Dialog Lintas SARA Dalam Memperkuat Komitmen Kerukunan Bangsa Untuk Sulawesi Barat Malaqbi.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog Lintas SARA dalam memperkuat komitmen kerukunan bangsa untuk Sulbar Malaqbiq.	0 Org	0	- Dialog Lintas SARA Dalam Memperkuat Komitmen Kerukunan Bangsa Untuk Sulawesi Barat Malaqbi.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog Lintas SARA dalam memperkuat komitmen kerukunan bangsa untuk Sulbar Malaqbiq.	0 Org	0
21	- Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Rangka Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Terkait Kerukunan Bangsa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta peningkatan kapasitas ASN dalam rangka sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan terkait kerukunan bangsa.	0 Org	0	- Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Rangka Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Terkait Kerukunan Bangsa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta peningkatan kapasitas ASN dalam rangka sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan terkait kerukunan bangsa.	0 Org	0
22	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0 Org	0	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0 Org	0

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23	Dialog dan Seminar Nilai - Nilai Pancasila Dalam Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme Bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan seminar nilai-nilai Pancasila dalam mengantisipasi penyebaran paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.	0 Org	0	Dialog dan Seminar Nilai - Nilai Pancasila Dalam Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme Bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan seminar nilai-nilai Pancasila dalam mengantisipasi penyebaran paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.	0 Org	0
24	Dialog Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat.	0 Org	0	Dialog Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat.	0 Org	0
25	Seminar Penguatan Pemahaman Ideologi Pancasila Sebagai Perwujudan Nilai - Nilai Budaya Lokal Bagi Kalangan Pemuda dan Mahasiswa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti seminar penguatan pemahaman Ideologi Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai budaya lokal bagi kalangan pemuda dan mahasiswa.	40 Org	150.000.000	Seminar Penguatan Pemahaman Ideologi Pancasila Sebagai Perwujudan Nilai - Nilai Budaya Lokal Bagi Kalangan Pemuda dan Mahasiswa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti seminar penguatan pemahaman Ideologi Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai budaya lokal bagi kalangan pemuda dan mahasiswa.	40 Org	150.000.000
26	Forum Dialog Penguatan Nilai - Nilai Pancasila Senagai Ideologi Terbuka Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Masa Depan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog penguatan nilai-nilai Pancasila senagai Ideologi terbuka untuk mewujudkan visi Indonesia Masa Depan.	0 Org	0	Forum Dialog Penguatan Nilai - Nilai Pancasila Senagai Ideologi Terbuka Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Masa Depan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog penguatan nilai-nilai Pancasila senagai Ideologi terbuka untuk mewujudkan visi Indonesia Masa Depan.	0 Org	0
27	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi komunitas masyarakat berbasis keagamaan.	0 Org	0	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi komunitas masyarakat berbasis keagamaan.	0 Org	0
28	Seminar / Forum Dialog / Workshop Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pancasila Sebagai Satu - satunya Ideologi Berbangsa dan Bernegara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta seminar / forum dialog / workshop penguatan kesadaran masyarakat tentang Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi berbangsa dan bernegara.	100%	150.000.000	Seminar / Forum Dialog / Workshop Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pancasila Sebagai Satu - satunya Ideologi Berbangsa dan Bernegara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta seminar / forum dialog / workshop penguatan kesadaran masyarakat tentang Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi berbangsa dan bernegara.	100%	150.000.000
29	Koordinasi Antar Lembaga Terkait Dalam Rangka Pendidikan, Revitalisasi, dan Aktualisasi Ideologi Pancasila Bagi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka pendidikan, revitalisasi dan aktualisasi Ideologi Pancasila bagi Masyarakat.	0 Org	0	Koordinasi Antar Lembaga Terkait Dalam Rangka Pendidikan, Revitalisasi, dan Aktualisasi Ideologi Pancasila Bagi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka pendidikan, revitalisasi dan aktualisasi Ideologi Pancasila bagi Masyarakat.	0 Org	0

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
30	Forum dialog Implementasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Bagi Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bagi Generasi Muda.	0 Org	0	Forum dialog Implementasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Bagi Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bagi Generasi Muda.	0 Org	0
31	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Ideologi Pancasila Melalui Media Massa Berbasis Internet.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila melalui media massa berbasis Internet.	0 Org	0	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Ideologi Pancasila Melalui Media Massa Berbasis Internet.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila melalui media massa berbasis Internet.	0 Org	0
32	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0 Lap.	0	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0 Lap.	0
33	Sosialisasi dan dialog pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan Untuk Pemuda dan Perempuan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta sosialisasi dan dialog pengembangan nilai-nilai kebangsaan untuk Pemuda dan Perempuan.	0 Org	0	Sosialisasi dan dialog pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan Untuk Pemuda dan Perempuan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta sosialisasi dan dialog pengembangan nilai-nilai kebangsaan untuk Pemuda dan Perempuan.	0 Org	0
34	Monitoring Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan Serta Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah monev pelaksanaan PWK, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan serta karakter bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0 Org	0	Monitoring Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan Serta Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah monev pelaksanaan PWK, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan serta karakter bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0 Org	0
35	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat.	0 Org	0	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat.	0 Org	0
36	Peningkatan Pembinaan Karakter Bangsa Bagi Generasi Muda di Kabupaten Mamuju Utara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang peningkatan pembinaan karakter bangsa bagi generasi muda di Kabupaten Mamuju Utara.	40 Org	150.000.000	Peningkatan Pembinaan Karakter Bangsa Bagi Generasi Muda di Kabupaten Mamuju Utara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang peningkatan pembinaan karakter bangsa bagi generasi muda di Kabupaten Mamuju Utara.	40 Org	150.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
37	Peningkatan Pemahaman dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa dan Kecamatan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pemahaman dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat desa dan kecamatan.	0 Org	0	Peningkatan Pemahaman dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa dan Kecamatan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pemahaman dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat desa dan kecamatan.	0 Org	0
38	Forum Dialog Pembinaan dan Peningkatan Jiwa Nasionalisme Bagi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog pembinaan dan peningkatan jiwa nasionalisme bagi masyarakat.	0 Org	0	Forum Dialog Pembinaan dan Peningkatan Jiwa Nasionalisme Bagi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog pembinaan dan peningkatan jiwa nasionalisme bagi masyarakat.	0 Org	0
39	Penguatan Nilai - Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Karakter Ke - Indonesia-an di Kalangan Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun karakter Ke-Indonesia-an di kalangan generasi muda.	0 Org	0	Penguatan Nilai - Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Karakter Ke - Indonesia-an di Kalangan Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun karakter Ke-Indonesia-an di kalangan generasi muda.	0 Org	0
40	Pembinaan Kesadaran Generasi Muda Tentang Cinta Tanah Air Dalam Rangka Revolusi Mental.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kesadaran generasi muda tentang cinta tanah air dalam rangka Revolusi Mental.	0 Org	0	Pembinaan Kesadaran Generasi Muda Tentang Cinta Tanah Air Dalam Rangka Revolusi Mental.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kesadaran generasi muda tentang cinta tanah air dalam rangka Revolusi Mental.	0 Org	0
41	Pembentukan Kader Bela Negara Bagi Generasi dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembentukan kader bela negara bagi generasi dan masyarakat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	0 Org	0	Pembentukan Kader Bela Negara Bagi Generasi dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembentukan kader bela negara bagi generasi dan masyarakat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	0 Org	0
42	Dialog dan seminar Penguatan Nilai Kearifan Lokal Untuk Membentuk karakter Bangsa Dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan seminar penguatan nilai kearifan lokal untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	0 Org	0	Dialog dan seminar Penguatan Nilai Kearifan Lokal Untuk Membentuk karakter Bangsa Dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan seminar penguatan nilai kearifan lokal untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	0 Org	0
43	Kemah Ke - Bhineka-an Bagi Pelajar se - Sulawesi Barat untuk Indonesia Satu.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti kemah ke-Bhinneka-an bagi pelajar se-Sulawesi Barat untuk Indonesia Satu.	0 Org	0	Kemah Ke - Bhineka-an Bagi Pelajar se - Sulawesi Barat untuk Indonesia Satu.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti kemah ke-Bhinneka-an bagi pelajar se-Sulawesi Barat untuk Indonesia Satu.	0 Org	0

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
44	Forum Dialog Dalam Rangka penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Bhineka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog dalam rangka penguatan kesadaran masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.	0 Org	0	Forum Dialog Dalam Rangka penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Bhineka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog dalam rangka penguatan kesadaran masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.	0 Org	0	
45	Forum Dialog lintas Generasi Dalam Rangka Revitalisasi Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog lintas generasi dalam rangka revitalisasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.	0 Org	0	Forum Dialog lintas Generasi Dalam Rangka Revitalisasi Nilai - Nilai Sejarah Kebangsaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog lintas generasi dalam rangka revitalisasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.	0 Org	0	
46	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pembinaan karakter bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	1 Lap.	75.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pembinaan karakter bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	1 Lap.	75.000.000	
J U M L A H					10.760.413.055	J U M L A H					10.760.413.055

Mamuju, 31 Mei 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat**Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM**Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19640408 198603 1 023

Catatan Penting
(12)
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat

Catatan Penting
(12)
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat

Catatan Penting
(12)
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Catatan Penting
(12)
Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
Bidang Politik Dalam Negeri
Bidang Politik Dalam Negeri
Bidang Politik Dalam Negeri
Bidang Politik Dalam Negeri
Bidang Politik Dalam Negeri
Bidang Politik Dalam Negeri

Catatan Penting
(12)
Bidang Politik Dalam Negeri
Bidang Politik Dalam Negeri
Bidang Politik Dalam Negeri
Bidang Politik Dalam Negeri
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan

Catatan Penting
(12)
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
Bidang Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
Bidang Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
Bidang Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
Bidang Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Wawasan Kebangsaan

Catatan Penting
(12)
Bidang Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
Bidang Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
Bidang Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
Bidang Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
Bidang Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
Bidang Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Wawasan Kebangsaan

Catatan Penting
(12)
Bidang Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
Bidang Bina Ideologi, Karakter Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan

Catatan Penting
(12)
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan

Catatan Penting
(12)
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2020
Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Provinsi Sulawesi Barat

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.		Terpenuhinya seluruh fasilitas SDM dan terpenuhinya pelayanan prima.		1.215.082.743		1.163.922.625	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah materai 6000 & 3000 yang terbelikan dan Jumlah gaji PTT yang terbayarkan.	12 Bulan	375.750.000	APBD	395.750.000	Sekretariat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pembayaran rekening telepon dan fax kantor.	12 Bulan	30.000.000	APBD	30.000.000	Sekretariat
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah berapa macam jenis alat tulis kantor yang terpakai.	12 Bulan	40.000.000	APBD	40.000.000	Sekretariat
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan.	12 Bulan	30.000.000	APBD	30.000.000	Sekretariat
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah bahan bacaan, majalah koran dan ucapan selamat yang terbayarkan.	12 Bulan	40.000.000	APBD	40.000.000	Sekretariat
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah makan dan minum rapat, tamu serta pegawai selama setahun.	12 Bulan	50.000.000	APBD	50.000.000	Sekretariat
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah SPPD dan laporan perjalanan dinas Luar Daerah selama setahun.	12 Bulan	300.045.750	APBD	275.450.000	Sekretariat
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Provinsi, SKPD, Polewali Mandar, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara	Jumlah SPPD dan laporan perjalanan dinas di 5 Kabupaten selama setahun.	12 Bulan	349.286.993	APBD	302.722.625	Sekretariat
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.		Terpenuhinya dengan baik seluruh sarana dan prasarana administrasi kantor.		242.159.146		562.938.872	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan mobil eselon III Jumlah pengadaan mobil double garden Jumlah pengadaan motor	0 Unit	0	APBD	150.000.000	Sekretariat
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan lemari arsip	0 Unit	0	APBD	25.000.000	Sekretariat
3	Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan Kelengkapannya	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan komputer desktop Jumlah pengadaan laptop Jumlah pengadaan printer	0 Unit 0 Unit 0 Unit	0	APBD	-	Sekretariat
4	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan CCTV Jumlah pengadaan camera drone Jumlah pengadaan camera vios	0 Paket 0 Unit 0 Unit	0	APBD	50.000.000	Sekretariat
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah ruangan kantor yang terpelihara	0 Tahun	0	APBD	50.000.000	Sekretariat
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pemeliharaan BBM, Suku Cadang dan STNK Mobil serta Gaji Sopir Eselon II.	12 Bulan	110.250.000	APBD	125.725.000	Sekretariat

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pemeliharaan 16 Unit motor dan 3 Unit mobil operasional.	12 Bulan	125.750.000	APBD	150.825.000	Sekretariat
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pemeliharaan segala peralatan kantor.	12 Bulan	6.159.146	APBD	11.388.872	Sekretariat
9	Pengadaan Peralatan Kantor	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan sistem manajemen terpadu.	0 Paket	0	APBD	-	Sekretariat
10	Pengadaan Sistem Manajemen Terpadu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor.	0 Dokumen	0	APBD	-	Sekretariat
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.		154.304.860		157.327.758	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pengadaan pakaian dinas : keyu, batik, sutra dan olahraga	68 Pasang	154.304.860	APBD	157.327.758	Sekretariat
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.		Tersedianya SDM yang berkualitas.		621.443.246		658.118.794	
1	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim III Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim IV Jumlah PNS yang mengikuti diklat lainnya	2 Orang 6 Orang 2 Orang	25.000.000	APBD	25.000.000	Sekretariat
2	- Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan Kesbang Pol. se-Sulawesi Barat	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti Rakertek & Sinkronisasi Program Kegiatan Kesbangpol. se-Provinsi Sulawesi Barat	50 Orang	125.000.000	APBD	125.000.000	Sekretariat
3	- Rapat Koordinasi Tim Verifikasi, Monev dan Pelaporan Bantuan Dana Hibah	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rakor Tim Verifikasi, Monev dan Pelaporan Bantuan Dana Hibah	0 Org	0	APBD	-	Sekretariat
4	- Rapat Koordinasi Strategis Pemerintah Daerah	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah	40 Org	221.443.246	APBD	250.000.000	Sekretariat
5	- Rapat Koordinasi Terkait Tentang Penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Terkait Tentang Penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar	0 Org	0	APBD	50.000.000	Sekretariat
6	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Monev Pelaksanaan Penyusunan SOP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulbar	40 Orang	50.000.000	APBD	-	Sekretariat
7	- Tim Fasilitasi Pengolahan Data, Analisis Informasi & Kajian Strategis	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Tim Fasilitasi Pengolahan Data, Analisis Informasi & Kajian Strategis	0 Orang	0	APBD	-	Sekretariat
8	- Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FORKOPIMDA)	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pelaksanaan kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pemerintah Daerah	4 Kali 100 Orang	200.000.000	APBD	208.118.794	Sekretariat
V	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.		Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.		52.423.060		74.420.324	
1	- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen laporan yang telah tersusun	2 Dokumen Laporan	4.500.000	APBD	4.500.000	Sekretariat
2	- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun CaLK yang tersusun	1 Dokumen Laporan	4.500.000	APBD	4.500.000	Sekretariat
3	- Penyusunan Renstra - Renja SKPD	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen perencanaan yang telah tersusun	1 Dokumen	5.000.000	APBD	5.420.324	Sekretariat
4	- Penyusunan RKA / DPA - SKPD	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen rencana pelaksanaan anggaran yang telah tersusun	2 Dokumen	5.000.000	APBD	5.000.000	Sekretariat
5	- Penyusunan RKA - P / DPPA - SKPD	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen rencana pelaksanaan anggaran perubahan yang telah tersusun	2 Dokumen	5.000.000	APBD	5.000.000	Sekretariat

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah pelaksanaan monev program kegiatan	4 Laporan	23.923.060	APBD	25.000.000	Sekretariat
7	- Penyusunan Laporan LKJIP, LPPD dan LKPJ	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen pelaporan inti : LKJIP, LPPD dan LKPJ	3 Dokumen Laporan	4.500.000	APBD	5.000.000	Sekretariat
8	- Penyusunan Renstra / Renja / LAKIP dan LPPD.	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang telah tersusun.	2 dok.perencanaan & 2 dok. Pelaporan	0		-	
9	- Penyusunan ANJAB dan ABK	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	2 Dokumen	0	APBD	20.000.000	Sekretariat

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
VI	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.		Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan.		1.450.000.000		1.775.000.000	
1	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Provinsi, SKPD	Jumlah pertemuan tim terpadu penanganan konflik sosial	2 Kali	200.000.000	APBD	100.000.000	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
2	Training Of Trainer (TOT) Penanganan Konflik Sosial.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mampu dalam penanganan konflik.	40 Org	100.000.000	APBD	100.000.000	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
3	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Provinsi, SKPD, Mamuju Utara, Polewali Mandar, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah	Jumlah kabupaten yang dipantau orang asing dan lembaga asingnya	6 Kabupaten	150.000.000	APBD	100.000.000	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
4	Antisipasi Dini dan Cegah Dini Terhadap Dampak Teknologi dan Informasi (Media Online).	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mampu antisipasi dini dan cegah dini.	40 Org	100.000.000	APBD	100.000.000	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
5	Penyusunan Ranperda tentang Penanganan Konflik Sosial.	Provinsi, SKPD	Jumlah dokumen penyusunan Ranperda tentang Penanganan Konflik Sosial.	1 Dokumen	0	APBD	150.000.000	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
6	Orientasi Peningkatan Kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah laporan orientasi peningkatan kapasitas Tim Kewaspadaan Dini Daerah.	1 Laporan	150.000.000	APBD	200.000.000	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
7	Pengembangan dan Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kewaspadaan Dini Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan tim terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini Daerah.	50 Org	200.000.000	APBD	250.000.000	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
8	Pengumpulan Data, Keterangan dan Informasi Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah dokumen laporan pengumpulan data, keterangan dan informasi penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini daerah.	1 Laporan	50.000.000	APBD	75.000.000	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
9	Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi penanganan konflik sosial.	40 Org	150.000.000	APBD	200.000.000	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
10	Forum Dialog Komunitas Intelijen Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta kegiatan forum dialog komunitas intelijen daerah.	0 Org	0	APBD	100.000.000	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
11	Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelijen Aparat di Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti diklat intelijen.	5 Org	50.000.000	APBD	-	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah laporan monev pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini daerah.	1 Dok. Lap.	150.000.000	APBD	200.000.000	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
13	Forum Komunikasi dan Konsolidasi Intelijen Daerah Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta forum komunikasi dan konsolidasi intelijen Daerah Sulbar.	0 Org	0	APBD	100.000.000	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
14	Antisipasi Dini, Cegah Dini, Paham Radikalisme dan Terorisme.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta antisipasi dini, cegah dini, paham radikalisme dan terorisme.	0 Org	0	APBD	100.000.000	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
15	Sosialisasi Perda Penanganan Konflik Sosial.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta sosialisasi Perda penanganan konflik sosial.	0 Org	0	APBD	-	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penanganan Paham Radikalisme dan Terrorisme.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan penanganan paham radikalisme dan terrorisme.	0 Org	0	APBD		Bidang Penanganan - Konflik dan Kewaspadaan Nasional
17	Dukungan Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.	Provinsi, SKPD	Jumlah dukungan operasional tim terpadu penanganan konflik sosial.	0 Dok.	0	APBD		Bidang Penanganan - Konflik dan Kewaspadaan Nasional
18	Pemantauan dan Pengamanan Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pilkada.	Provinsi, SKPD	Jumlah pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pilkada.	6 Kab.	150.000.000	APBD		Bidang Penanganan - Konflik dan Kewaspadaan Nasional

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Pemantauan dan Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif.	Provinsi, SKPD	Jumlah pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dan legislatif.	0 Kab.	0	APBD	-	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
20	Penguatan dan Pengembangan Tim Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing.	Provinsi, SKPD	Jumlah Tim pemantauan yang mengikuti penguatan dan pengembangan.	0 Tim	0	APBD	-	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
VII	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan.		Terciptanya Ketertiban dan Keamanan dalam Masyarakat.		100.000.000		200.000.000	
1	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat.	40 Org	100.000.000	APBD	100.000.000	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
2	Workshop Peningkatan Peran Tokoh Pemuda, LSM, Dalam Kewaspadaan Dini di Masyarakat.	Provinsi, SKPD, Mamuju	Jumlah peserta workshop peran tokoh pemuda, LSM, dalam kewaspadaan dini di masyarakat.	0 Org	0	APBD	100.000.000	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
VIII	Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri.		Terfasilitasinya politik dalam negeri.		850.000.000		850.000.000	
1	Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.	Provinsi, SKPD	Partai politik yang telah diverifikasi, evaluasi dan pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.	16 Partai	200.000.000	APBD	250.000.000	Bidang Politik Dalam Negeri
2	Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).	Provinsi, SKPD	Peningkatan demokrasi IDI terhadap 3 aspek yaitu : aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik & aspek lembaga demokrasi.	3 aspek, 11 variabel & 28 indikator	250.000.000	APBD	250.000.000	Bidang Politik Dalam Negeri
3	Penyusunan Data Base Kelembagaan Partai Politik.	Provinsi, SKPD	Tersusunnya database Partai Politik sebagai peserta Pemilu.	16 Partai	200.000.000	APBD	-	Bidang Politik Dalam Negeri
4	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.	Provinsi, SKPD	Menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif.	5 Dok. Lap.	200.000.000	APBD	350.000.000	Bidang Politik Dalam Negeri
IX	Program Pendidikan Politik Masyarakat.		Terwujudnya pendidikan politik masyarakat.		850.000.000		1.275.000.000	
1	Pengembangan Etika dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal Bagi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Mampu memahami budaya dan kebiasaan masyarakat di tempat dimana dia berada.	1 Dok. Lap.	250.000.000	APBD	300.000.000	Bidang Politik Dalam Negeri
2	Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula.	Provinsi, SKPD	Meningkatnya pemahaman tentang politik bagi masyarakat bagi pemilih pemula.	1 Dok. Lap.	200.000.000	APBD	250.000.000	Bidang Politik Dalam Negeri
3	Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.	Provinsi, SKPD	Meningkatnya pemahaman tentang berpolitik bagi kaum perempuan dalam kehidupan berdemokrasi.	1 Dok. Lap.	150.000.000	APBD	200.000.000	Bidang Politik Dalam Negeri
4	Workshop Penguatan Fungsi Lembaga Partai Politik Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi.	Provinsi, SKPD	Pelaksanaanya fungsi lembaga partai politik dalam kehidupan berdemokrasi.	1 Dok. Lap.	250.000.000	APBD	275.000.000	Bidang Politik Dalam Negeri
5	Sosialisasi Peran dan Fungsi Lembaga - Lembaga Demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Meningkatnya sosialisasi pemahaman tentang peran dan fungsi lembaga - lembaga demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat.	0 Dok. Lap.	0	APBD	250.000.000	Bidang Politik Dalam Negeri

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Sosialisasi Permendagri Tentang Bantuan Partai Politik.	Provinsi, SKPD	Meningkatnya pemahaman sosialisasi Permendagri tentang Bantuan Partai Politik.	0 Dok. Lap.	0	APBD	-	Bidang Politik Dalam Negeri
X	Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan		Terciptanya peningkatan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan		750.000.000		750.000.000	
1	Sosialisasi Perda Provinsi Sulawesi Barat No. 3 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.	Provinsi, SKPD	Meningkatnya pemahaman sosialisasi Perda Provinsi Sulawesi Barat No.3 tentang pencegahan, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya.	0 Kali	0	APBD	-	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan
2	Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Rakorda FKUB se-Sulawesi Barat.	40 Org	150.000.000	APBD	150.000.000	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Kemasyarakatan

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peran FKUB dalam memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama.	0 Org	0	APBD	150.000.000	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Masyarakat
4	Penguatan Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan kelembagaan FKUB se-Sulawesi Barat.	40 Org	150.000.000	APBD	-	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Masyarakat
5	Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Daerah.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pelestarian kesenian daerah.	0 Kali	0	APBD	150.000.000	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Masyarakat
6	Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal.	1 Kali	150.000.000	APBD	-	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Masyarakat
7	Sarasehan dan Dialog Agama dan Ormas.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan dan dialog agama dan ormas.	1 Kali	150.000.000	APBD	-	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Masyarakat
8	Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama se - Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti temu tokoh agama, generasi muda antar umat beragama se-Sulbar.	0 Org	0	APBD	150.000.000	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Masyarakat
9	Forum Komunikasi dan Konsultasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Forkomkon P4GN).	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan Forkomkon P4GN.	1 Kali	150.000.000	APBD	150.000.000	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Masyarakat
XI	Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.		Meningkatnya seluruh kegiatan fungsi dan keberadaan Ormas.		250.000.000		350.000.000	
1	Tim Identifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Ormas.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti tim identifikasi, monitoring, evaluasi dan penanganan Ormas.	0 Org	-	APBD	150.000.000	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Masyarakat
2	Dialog Pemerintah Daerah dan Ormas.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog pemerintah daerah dan Ormas.	30 Org	150.000.000	APBD	100.000.000	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Masyarakat
3	Sosialisasi dan Desiminasi PP No. 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan desiminasi PP No.58 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.	0 Kali & 0 Org	0	APBD	-	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Masyarakat
4	Tim Terpadu Pengawasan dan Evaluasi Ormas.	Provinsi, SKPD	Jumlah tim terpadu yang terbentuk untuk pengawasan dan evaluasi Ormas	1 Tm	100.000.000	APBD	100.000.000	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama & Masyarakat
XII	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.		Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan.		1.900.000.000		2.375.000.000	
1	Forum Penguatan Wawasan Ke - Sulbar-an Bagi Para Aparatur Sipil Negara se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan forum penguatan wawasan ke-Sulbar-an bagi para ASN se-Sulbar.	40 Org	100.000.000	APBD	150.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Training Of Facilitator (TOF) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Para Guru/ Pendidik se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah TOF PWK bagi para guru / pendidik se-Sulbar.	50 Org	150.000.000	APBD	200.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
3	Optimalisasi Peran Pusat Pendidik Wawasan Kebangsaan (PPWK) Dalam Penguatan Kesadaran Berbangsa di Daerah se-Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti optimalisasi peran PPWK dalam penguatan kesadaran berbangsa di Daerah se-Sulbar.	40 Org	100.000.000	APBD	175.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
4	Penguatan Peran dan kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Daerah se- Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan peran dan kapasitas FPK di Daerah se-Sulbar.	40 Org	100.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
5	Dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembauran kebangsaan bagi pemuka adat, suku dan masyarakat.	40 Org	100.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
6	Dialog Optimalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan dialog optimalisasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.	40 Org	100.000.000	APBD	100.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
7	Musyawarah kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019 - 2024.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2019-2024.	0 Kali	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
8	Musyawarah Kerja FPK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2021 - 2025.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2019-2024.	1 Kali	100.000.000	APBD	150.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
9	Forum Dialog Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda dan Perempuan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta forum dialog peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi pemuda dan perempuan.	1 Kali & 40 Org	150.000.000	APBD	250.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
10	Peningkatan Kapasitas ASN Tentang Wawasan Kebangsaan Melalui Kegiatan Jelajah Nusantara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN tentang wawasan kebangsaan melalui kegiatan Jelajah Nusantara.	25 Org	75.000.000	APBD	150.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
11	Forum dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Agama, Suku, Ras, Adat, Tokoh Masyarakat dan Pemuda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta forum dialog optimalisasi pembauran kebangsaan bagi pemuka agama, suku, ras, adat, tokoh masyarakat dan pemuda.	30 Org	75.000.000	APBD	150.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
12	Forum Koordinasi Antar FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum koordinasi antar FPK se-Sulawesi Barat.	0 Org	0	APBD	150.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
13	Sosialisasi dan Dialog Pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan Di Lingkungan Perguruan Tinggi.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan dialog pengembangan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi.	100%	150.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
14	Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se - Sulawesi Barat.	40 Org	100.000.000	APBD	150.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	Penyiapan Kader - Kader Pembaurnan Kebangsaan Melalui Pelatihan Tenaga Terlatih Pembaurnan Daerah (TPPD).	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Penyiapan Kader - Kader Pembaurnan Kebangsaan Melalui Pelatihan Tenaga Terlatih Pembaurnan Daerah (TPPD).	40 Org	100.000.000	APBD	150.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
16	Training Of trainer (TOT) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan TOT Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi Barat.	40 Org	100.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
17	Optimalisasi Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Dalam Penguatan Kesadaran Berbangsa di Daerah se-Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti optimalisasi peran PPWK dalam penguatan kesadaran berbangsa di Daerah se-Sulbar.	100 Org	150.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
18	Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Kerukunan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh NKRI.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kerukunan bangsa dalam rangka memperkokoh NKRI.	40 Org	150.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
19	Workshop Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
20	Dialog Lintas SARA Dalam Memperkuat Komitmen Kerukunan Bangsa Untuk Sulawesi Barat Malaqbi.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog Lintas SARA dalam memperkuat komitmen kerukunan bangsa untuk Sulbar Malaqbiq.	0 Org	0	APBD	250.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
21	Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Rangka Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Terkait Kerukunan Bangsa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta peningkatan kapasitas ASN dalam rangka sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan terkait kerukunan bangsa.	0 Org	0	APBD	250.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
22	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	1 Lap.	100.000.000	APBD	100.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
XIII	Program Pembinaan Ideologi Pancasila.		Meningkatnya pembinaan ideologi Pancasila.		750.000.000		500.000.000	
1	Dialog dan Seminar Nilai - Nilai Pancasila Dalam Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme Bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan seminar nilai-nilai Pancasila dalam mengantisipasi penyebaran paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme bagi Tokoh Agama dan Generasi Muda.	40 Org	200.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
2	Dialog Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat.	40 Org	100.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
3	Seminar Penguatan Pemahaman Ideologi Pancasila Sebagai Perwujudan Nilai - Nilai Budaya Lokal Bagi Kalangan Pemuda dan Mahasiswa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti seminar penguatan pemahaman Ideologi Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai budaya lokal bagi kalangan pemuda dan mahasiswa.	40 Org	150.000.000	APBD	150.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
4	Forum Dialog Penguatan Nilai - Nilai Pancasila Senagai Ideologi Terbuka Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Masa Depan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog penguatan nilai-nilai Pancasila senagai Ideologi terbuka untuk mewujudkan visi Indonesia Masa Depan.	0 Org	0	APBD	200.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi komunitas masyarakat berbasis keagamaan.	0 Org	0	APBD	150.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
6	Seminar / Forum Dialog / Workshop Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pancasila Sebagai Satu - satunya Ideologi Berbangsa dan Bernegara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta seminar / forum dialog / workshop penguatan kesadaran masyarakat tentang Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi berbangsa dan bernegara.	40 Org	150.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
7	Koordinasi Antar Lembaga Terkait Dalam Rangka Pendidikan, Revitalisasi, dan Aktualisasi Ideologi Pancasila Bagi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka pendidikan, revitalisasi dan aktualisasi Ideologi Pancasila bagi Masyarakat.	40 Org	150.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
8	Forum dialog Implementasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Bagi Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bagi Generasi Muda.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
9	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Ideologi Pancasila Melalui Media Massa Berbasis Internet.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila melalui media massa berbasis Internet.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
10	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0 Kali	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
XIV	Program Pembinaan Karakter Bangsa.		Membina karakter bangsa		525.000.000		550.000.000	
1	Sosialisasi dan dialog pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan Untuk Pemuda dan Perempuan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta sosialisasi dan dialog pengembangan nilai-nilai kebangsaan untuk Pemuda dan Perempuan.	0 Org	0	APBD	100.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
2	Monitoring Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan Serta Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah monev pelaksanaan PWK, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan serta karakter bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0 Org	0	APBD	100.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
3	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat.	40 Org	100.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
4	Peningkatan Pembinaan Karakter Bangsa Bagi Generasi Muda di Kabupaten Mamuju Utara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang peningkatan pembinaan karakter bangsa bagi generasi muda di Kabupaten Mamuju Utara.	40 Org	150.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
5	Peningkatan Pemahaman dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa dan Kecamatan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pemahaman dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat desa dan kecamatan.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
6	Forum Dialog Pembinaan dan Peningkatan Jiwa Nasionalisme Bagi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog pembinaan dan peningkatan jiwa nasionalisme bagi masyarakat.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Penguatan Nilai - Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Karakter Ke - Indonesia-an di Kalangan Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun karakter Ke-Indonesia-an di kalangan generasi muda.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
8	Pembinaan Kesadaran Generasi Muda Tentang Cinta Tanah Air Dalam Rangka Revolusi Mental.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kesadaran generasi muda tentang cinta tanah air dalam rangka Revolusi Mental.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
9	Pembentukan Kader Bela Negara Bagi Generasi dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembentukan kader bela negara bagi generasi dan masyarakat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
10	Dialog dan seminar Penguatan Nilai Kearifan Lokal Untuk Membentuk karakter Bangsa Dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan seminar penguatan nilai kearifan lokal untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
11	Kemah Ke - Bhinneka-an Bagi Pelajar se - Sulawesi Barat untuk Indonesia Satu.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti kemah ke-Bhinneka-an bagi pelajar se-Sulawesi Barat untuk Indonesia Satu.	0 Org	0	APBD	200.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
12	Forum Dialog Dalam Rangka penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Bhinneka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog dalam rangka penguatan kesadaran masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.	50 Org	200.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
13	Forum Dialog lintas Generasi Dalam Rangka Revitalisasi Nilai - Nilai Sejarah Kebangsaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog lintas generasi dalam rangka revitalisasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.	0 Org	0	APBD	75.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
14	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pembinaan karakter bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	1 Lap.	75.000.000	APBD	75.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
XV	Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.		Meningkatnya pembinaan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan.		1.050.000.000		1.000.000.000	
1	Forum Penguatan Wawasan Ke - Sulbar-an Bagi Para Aparatur Sipil Negara se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan forum penguatan wawasan ke-Sulbar-an bagi para ASN se-Sulbar.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
2	Training Of Facilitator (TOF) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Para Guru/ Pendidik se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah TOF PWK bagi para guru / pendidik se-Sulbar.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
3	Optimalisasi Peran Pusat Pendidik Wawasan Kebangsaan (PPWK) Dalam Penguatan Kesadaran Berbangsa di Daerah se-Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti optimalisasi peran PPWK dalam penguatan kesadaran berbangsa di Daerah se-Sulbar.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
4	Penguatan Peran dan kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Daerah se- Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan peran dan kapasitas FPK di Daerah se-Sulbar.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembauran kebangsaan bagi pemuka adat, suku dan masyarakat.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
6	Dialog Optimalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan dialog optimalisasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
7	Musyawahar kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019 - 2024.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2019-2024.	0 Kali	0	APBD	150.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
8	Musyawahar Kerja FPK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2021 - 2025.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja FPK Sulbar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2019-2024.	0 Kali	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
9	Forum Dialog Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda dan Perempuan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta forum dialog peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi pemuda dan perempuan.	0 Org	0	APBD	75.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
10	Peningkatan Kapasitas ASN Tentang Wawasan Kebangsaan Melalui Kegiatan Jelajah Nusantara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN tentang wawasan kebangsaan melalui kegiatan Jelajah Nusantara.	25 Org	75.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
11	Forum dialog Optimalisasi Pembauran Kebangsaan Bagi Pemuka Agama, Suku, Ras, Adat, Tokoh Masyarakat dan Pemuda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta forum dialog optimalisasi pembauran kebangsaan bagi pemuka agama, suku, ras, adat, tokoh masyarakat dan pemuda.	0 Org	0	APBD	150.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
12	Forum Koordinasi Antar FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum koordinasi antar FPK se-Sulawesi Barat.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
13	Sosialisasi dan Dialog Pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan Di Lingkungan Perguruan Tinggi.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan dialog pengembangan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi.	40 Org	150.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
14	Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se - Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se - Sulawesi Barat.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
15	Penyiapan Kader - Kader Pembauran Kebangsaan Melalui Pelatihan Tenaga Terlatih Pembauran Daerah (TPPD).	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti Penyiapan Kader - Kader Pembauran Kebangsaan Melalui Pelatihan Tenaga Terlatih Pembauran Daerah	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
16	Training Of trainer (TOT) Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan TOT Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik se-Sulawesi Barat.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
17	Optimalisasi Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Dalam Penguatan Kesadaran Berbangsa di Daerah se-Sulbar.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti optimalisasi peran PPWK dalam penguatan kesadaran berbangsa di Daerah se-Sulbar.	40 Org	150.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
18	Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Kerukunan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh NKRI.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kerukunan bangsa dalam rangka	40 Org	150.000.000	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
19	Workshop Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
20	Dialog Lintas SARA Dalam Memperkuat Komitmen Kerukunan Bangsa Untuk Sulawesi Barat Malaqbi.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog Lintas SARA dalam memperkuat komitmen kerukunan bangsa untuk Sulbar Malaqbiq.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
21	Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Rangka Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Terkait Kerukunan Bangsa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta peningkatan kapasitas ASN dalam rangka sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan terkait kerukunan bangsa.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
22	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0 Org	0	APBD		Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23	Dialog dan Seminar Nilai - Nilai Pancasila Dalam Mengantisipasi Penyebaran Paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme Bagi Tokoh Agama dan	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan seminar nilai-nilai Pancasila dalam mengantisipasi penyebaran paham Radikalisme.	0 Org	0	APBD	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
24	Dialog Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat.	0 Org	0	APBD	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
25	Seminar Penguatan Pemahaman Ideologi Pancasila Sebagai Perwujudan Nilai - Nilai Budaya Lokal Bagi Kalangan Pemuda dan Mahasiswa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti seminar penguatan pemahaman Ideologi Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai budaya lokal	40 Org	150.000.000	APBD	150.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
26	Forum Dialog Penguatan Nilai - Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Masa Depan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk mewujudkan visi Indonesia Masa Depan.	0 Org	0	APBD	200.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
27	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi komunitas masyarakat berbasis keagamaan.	0 Org	0	APBD	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
28	Seminar / Forum Dialog / Workshop Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pancasila Sebagai Satu - satunya Ideologi Berbangsa dan Bernegara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta seminar / forum dialog / workshop penguatan kesadaran masyarakat tentang Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi berbangsa dan bernegara.	100%	150.000.000	APBD	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
29	Koordinasi Antar Lembaga Terkait Dalam Rangka Pendidikan, Revitalisasi, dan Aktualisasi Ideologi Pancasila Bagi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka pendidikan, revitalisasi dan aktualisasi Ideologi Pancasila bagi Masyarakat.	0 Org	0	APBD	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
30	Forum dialog Implementasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Bagi Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bagi Generasi Muda.	0 Org	0	APBD	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
31	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Ideologi Pancasila Melalui Media Massa Berbasis Internet.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila melalui media massa berbasis Internet.	0 Org	0	APBD	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
32	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0 Lap.	0	APBD	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
33	Sosialisasi dan dialog pengembangan Nilai - Nilai Kebangsaan Untuk Pemuda dan Perempuan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta sosialisasi dan dialog pengembangan nilai-nilai kebangsaan untuk Pemuda dan Perempuan.	0 Org	0	APBD	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
34	Monitoring Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan Serta Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah monev pelaksanaan PWK, Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan serta karakter bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	0 Org	0	APBD	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
35	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat.	0 Org	0	APBD	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
36	Peningkatan Pembinaan Karakter Bangsa Bagi Generasi Muda di Kabupaten Mamuju Utara.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang peningkatan pembinaan karakter bangsa bagi generasi muda di Kabupaten Mamuju Utara.	40 Org	150.000.000	APBD	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	- Peningkatan Pemahaman dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa dan Kecamatan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan pemahaman dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat desa dan kecamatan.	0 Org	0	APBD		- Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
38	- Forum Dialog Pembinaan dan Peningkatan Jiwa Nasionalisme Bagi Masyarakat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog pembinaan dan peningkatan jiwa nasionalisme bagi masyarakat.	0 Org	0	APBD		- Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
39	- Penguatan Nilai - Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Karakter Ke - Indonesia-an di Kalangan Generasi Muda.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun karakter Ke-Indonesia-an di kalangan generasi muda.	0 Org	0	APBD		- Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
40	- Pembinaan Kesadaran Generasi Muda Tentang Cinta Tanah Air Dalam Rangka Revolusi Mental.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kesadaran generasi muda tentang cinta tanah air dalam rangka Revolusi Mental.	0 Org	0	APBD		- Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
41	- Pembentukan Kader Bela Negara Bagi Generasi dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembentukan kader bela negara bagi generasi dan masyarakat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	0 Org	0	APBD		- Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Prakiraan Maju Tahun 2021	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Dialog dan seminar Penguatan Nilai Kearifan Lokal Untuk Membentuk karakter Bangsa Dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dan seminar penguatan nilai kearifan lokal untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa.	0 Org	0	APBD	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
43	Kemah Ke - Bhineka-an Bagi Pelajar se-Sulawesi Barat untuk Indonesia Satu.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti kemah ke-Bhinneka-an bagi pelajar se-Sulawesi Barat untuk Indonesia Satu.	0 Org	0	APBD	200.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
44	Forum Dialog Dalam Rangka penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Bhineka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog dalam rangka penguatan kesadaran masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat Desa/Kelurahan dan	0 Org	0	APBD	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
45	Forum Dialog lintas Generasi Dalam Rangka Revitalisasi Nilai - Nilai Sejarah Kebangsaan.	Provinsi, SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog lintas generasi dalam rangka revitalisasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.	0 Org	0	APBD	-	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
46	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Karakter Bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Provinsi, SKPD	Jumlah pelaksanaan monev pembinaan karakter bangsa di Kabupaten se-Sulawesi Barat.	1 Lap.	75.000.000	APBD	75.000.000	Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa
JUMLAH					10.760.413.055		12.241.728.373	

Mamuju, 31 Mei 2019
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2016 s/d dengan Tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu 2014 (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2017 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2018 (tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2018 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)

H.DARWIN JUSUF, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19661231 199003 1 155

